

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN
(STUDI PADA BKAD KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

OLEH

**NAMA : HAFIZH ASSARIY MADJID
NPM : 1905170097
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : SEKTOR PUBLIK**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada Hari Selasa, Tanggal 19 September 2023, Pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : HAFIZH ASSARIY MADJID
N P M : 1905170097
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada
BKAD Kota Medan)
Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Penguji II

(M. Firza Alpi, S.E., M.Si)

Pembimbing

(M. Shareza Haliz, S.E., M.Acc)

Ketua

(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.)



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : HAFIZH ASSARIY MADJID
N.P.M : 1905170097
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN (STUDI PADA BKAD KOTA MEDAN)

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, Agustus 2023

Pembimbing Skripsi

(M. SHAREZA HAFIZ, SE., M.Acc)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

(Dr. H. JANURI, SE, MM, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hafizh Assariy Madjid
NPM : 1905170097
Dosen Pembimbing : M. Shareza Hafiz, SE., M.Acc
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BKAD Kota Medan)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1			
Bab 2			
Bab 3			
Bab 4	- Perbaiki presentasi hasil & pembahasan - Acc bab IV	01/08 02/08 05/08	✓
Bab 5	- Kesimpulan lebih diperjelas - Sesuaikan dengan hasil	01/08 02/08	✓
Daftar Pustaka	ok	05/08	✓
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace Sidang Meja Hijau	05/08	

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

Medan, Agustus 2023
Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. ZULIA HANUM, SE, M.Si

M. SHAREZA HAFIZ, SE., M.Acc



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafizh Assariy Madjid
NPM : 1905170097
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada BKAD Kota Medan)

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Instansi tersebut

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, September 2023

Yang membuat pernyataan



HAFIZH ASSARIY MADJID

ABSTRAK

PENGARUH STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA BKAD KOTA MEDAN)

Hafizh Assariy Madjid

Program Studi Akuntansi

Email : hafizhmadjid12@gmail.com

Penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal di BKAD Kota Medan terhadap penyusunan laporan keuangan merupakan komponen permasalahan yang telah penulis cermati. Tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan bagaimana, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal yang dalam kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan mempengaruhi kualitas laporan keuangan di BKAD Kota Medan. Metode analisis data yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif. Distribusi kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data, dan kuesioner yang telah diisi dikembalikan untuk diproses. Dengan menggunakan aplikasi SPSS, data diperiksa dan diolah. Menurut temuan penelitian berdasarkan uji t, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal yang terlibat dalam menghasilkan laporan keuangan semuanya berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Selain itu, temuan penelitian uji F menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal semuanya memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, dengan koefisien determinasi sebesar 78,7%. Menurut analisis statistik, kualitas laporan keuangan di BKAD Kota Medan dipengaruhi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal.

Kata kunci : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Laporan Keuangan

ABSTRACT

THE EFFECT OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS AND INTERNAL CONTROL SYSTEMS ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS (STUDY AT BKAD KOTA MEDAN)

Hafizh Assariy Madjid

Accounting Study Program

Email : hafizhmadjid12@gmail.com

The application of government accounting standards, the internal control system at the Medan City BKAD on the preparation of financial statements are components of the problem that the author has observed. The purpose of this study is to ascertain how, the application of government accounting standards, internal control systems in relation to the preparation of financial statements affect the quality of financial statements in BKAD Medan City. The data analysis method is carried out using a quantitative approach. Questionnaire distribution is used to collect data, and completed questionnaires are returned for processing. Using the SPSS application, the data is checked and processed. According to research findings based on t-tests, the application of government accounting standards, the internal control system involved in producing financial statements all have a significant effect on the quality of government financial statements. In addition, the findings of the F test study show that government accounting standards, internal control systems all have a significant impact on the quality of government financial statements, with a coefficient of determination of 78.7%. According to statistical analysis, the quality of financial statements in BKAD Medan City is influenced by the implementation of government accounting standards, and internal control systems.

Keywords: Application of Government Accounting Standards, Internal Control System, Quality of Financial Statements

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas Ridho dan Hidayah-Nya kepada kita semua yang masih diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan, serta shalawat beriring salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.

Proposal skripsi ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dan memperoleh gelar S.Ak Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam pembuatan proposal skripsi ini, penulis banyak mendapatkan doa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Terutama penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orangtua saya tercinta ayah Suheri dan bunda Vivi Purnama Sari yang telah mendukung saya serta mendoakan dan mengorbankan tenaga dan materi untuk bisa membuat saya bisa sampai kejenjang pendidikan ini.

Kelancaran dan keberhasilan penulis dalam membuat proposal skripsi ini tidak terlepas berkat bantuan, bimbingan dan peran serta berbagai pihak yang memberikan dukungan secara langsung, maupun tidak langsung, oleh karena itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, keselamatan dan kesehatan baik jasmani

dan rohani, Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan kami, dan juga Orang Tua saya, dan adik saya Habib yang telah mensupport saya, mendoakan segala kelancaran buat saya dan memberikan saya berupa biaya untuk saya bisa melaksanakan perkuliahan tanpa kekurangan suatu apapun.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung, diantaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan program PKL/Magang
2. Bapak Dr. H. Januri., SE., M.M., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar Harahap, SE., M.Si, Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak M. Shareza Hafiz, SE., M.Acc selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada saya.

8. Ibu Henny Zurika Lubis, SE., M.Si selaku Dosen PA yang telah memberi dukungan kepada saya.
9. Bapak dan Ibu Dosen/Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Para pegawai BKAD Kota Medan yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan banyak memberikan informasi selama penulis melakukan penelitian.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dan Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih memiliki kekurangan. Dengan demikian besar harapan penulis untuk saran dan kritik dari berbagai pihak guna untuk perbaikan di masa akan datang. Semoga proposal skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Amin Ya Rabbal'alam

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juni 2023
Penulis

HAFIZH ASSARIY MADJID
1905170097

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Manfaat Penelitian	8
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan	10
2.1.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	19
2.1.3 Sistem Pengendalian Internal.....	26
2.1.4 Penelitian Terdahulu.....	30
2.2 Kerangka Konseptual.....	35
2.3 Hipotesis	37
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan Penelitian	38
3.2 Definisi Operasional Variabel	38
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
3.4 Populasi dan Sampel Penelitian	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	44
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Hasil Penelitian	50
4.2 Analisis Persentase Jawaban Responden	52

4.3	Analisis Data	56
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian.....	68
BAB V	72
PENUTUP	72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 3. 1 Operasional Variabel	40
Tabel 3. 2 Waktu Penelitian	42
Tabel 3. 3 Jumlah Pegawai BKAD Kota Medan	43
Tabel 3. 4 Jumlah Pegawai yang Terlibat dalam Pembuatan Laporan Keuangan BKAD Kota Medan.....	44
Tabel 4. 1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner	50
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	51
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	51
Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja	52
Tabel 4. 5 Persentase Responden Variabel Standar Akuntansi Pemerintah.....	53
Tabel 4. 6 Persentase Responden Variabel Sistem Pengendalian Internal.....	54
Tabel 4. 7 Persentase Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan	55
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Variabel X1.....	57
Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Variabel X2.....	58
Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Variabel Y.....	59
Tabel 4. 11 Hasil Uji Reabilitas X1.....	59
Tabel 4. 12 Hasil Uji Reabilitas X2.....	60
Tabel 4. 13 Hasil Uji Reabilitas Y	60
Tabel 4. 14 Hasil Uji Normalitas.....	61
Tabel 4. 15 Hasil Uji Multikoleniaritas	62
Tabel 4. 16 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	64
Tabel 4. 17 Hasil Uji t	65
Tabel 4. 18 Hasil Uji F	66
Tabel 4. 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Jawaban Kuesioner Variabel Standar Akuntansi Pemerintah ..	85
Lampiran 2. Hasil Jawaban Kuesioner Variabel Sistem Pengendalian Internal	86
Lampiran 3. Hasil Jawaban Kuesioner Variabel Kualitas Laporan Keuangan	88
Lampiran 4. Hasil SPSS	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	25
Gambar 4. 1 Hasil Uji Heterokedastisitas	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penyampaian laporan keuangan pemerintah yang tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku umum merupakan salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menerapkan transparansi dan kewajiban akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara (Maulana, 2012). Sebagai sarana untuk memastikan akuntabilitas publik, akuntansi pemerintah sangat penting dalam penyusunan akun keuangan.. Akuntansi merupakan sebuah proses sistematis pengumpulan dan analisis data untuk memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menginformasikan keputusan bisnis dan mengevaluasi kinerja organisasi (Elsye, et. al, 2016).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mensyaratkan bahwa laporan keuangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang pemerintah. Dengan pertumbuhan sektor publik di Indonesia, ada fenomena di mana permintaan akan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas tinggi meningkat (Nurilah, 2014). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengatur standar akuntansi pemerintah, dan laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus mematuhi standar tersebut agar dapat disusun secara tepat waktu dan tepat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintah, fitur kualitatif yang diperlukan harus relevan, dapat diandalkan, sebanding, dan dapat dipahami.

Berkenaan dengan SAP berbasis akrual, pemerintah memperbarui PP No. 24 Tahun 2005 dengan merilis PP No. 71 Tahun 2010. Hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan akurasi informasi pelaporan keuangan. Untuk mempromosikan manajemen keuangan/aset yang lebih terbuka dan akuntabel, akuntansi berbasis akrual harus digunakan. Ini dapat menghasilkan metrik kinerja yang lebih baik. Basis moneter standar akuntansi pemerintah telah diganti dengan dasar yang agak canggih, yang mengharuskan penerapan konsep akuntansi secara menyeluruh. Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan menurun apabila peraturan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tidak terimplementasi dengan baik.

Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa pemahaman yang tidak lengkap dalam aturan dapat menunjukkan kecenderungan aturan diterapkan secara naluriah daripada sesuai dengan aturan yang relevan. Ketiadaan pengetahuan mendasar tentang penerapan aturan akuntansi pemerintah berbasis akrual menjadi salah satu tantangannya. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan yang disajikan akan dipengaruhi oleh tingginya dan rendahnya tingkat penerapan regulasi (Kiranayanti, 2016).

Efisiensi pengendalian internal yang ditetapkan oleh instansi pemerintah daerah dapat menentukan seberapa baik atau buruk laporan keuangan pemerintah daerah itu disusun. Dimana, bukti audit yang berasal dari data akuntansi mungkin tidak bisa dikatakan kredibel. Dan juga penerapan pengendalian internal yang tidak efektif dapat menyulitkan untuk menemukan kecurangan atau kesalahan dalam proses akuntansi (Nurilah dan Muid, 2016).

Pelaksanaan audit atas laporan keuangan pemerintah mengandung beberapa penyimpangan berdasarkan temuan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Misalnya, BPK-RI memberikan opini "Tidak Wajar" dalam temuan investigasi laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2006–2007, "Wajar Dengan Pengecualian (WDP)" pada tahun 2008–2013, dan barulah BPK-RI memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" pada tahun 2014–2022 (BPK-RI, 2022). Pandangan ini mengarah pada kesimpulan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah meningkat pesat, terutama karena telah menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali antara tahun 2014-2022 (Detik, 2022). Perlu dicatat bahwa penilaian WTP tidak selalu menyiratkan bahwa tidak ada temuan atau masalah yang perlu diselidiki lebih lanjut dan diselesaikan. Seperti pada tahun 2018 BPK-RI menemukan temuan masalah atas sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (kesesuaian standar akuntansi pemerintah).

BPK-RI (2018) menyampaikan temuan masalah atas sistem pengendalian internal yang ada di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut : Pergeseran Anggaran Rincian Obyek Belanja 43 Organisasi Perangkat Daerah, (OPD)/Satuan Kerja (SatKer) tidak ditetapkan melalui Peraturan Daerah perubahan APBD, Saldo Dana Bergulir masih dikuasai PT. Bank Sumut dan Penjaminan Pinjaman tidak sesuai ketentuan, Penataan Aset Tetap belum memadai, antara lain permasalahan tahun sebelumnya yang belum selesai ditindaklanjuti, permasalahan penilaian aset, dan pencatatan aset.

Lalu, temuan masalah atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut :Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan, yang merupakan kelebihan pembayaran atas belanja perjalanan dinas, realisasi kegiatan kunjungan kerja tidak sesuai senyatanya, belanja perjalanan dinas yang tidak didukung bukti yang lengkap, dan pertanggungjawaban belanja BBM kendaraan dinas yang tidak didukung bukti yang lengkap. Atas kerugian tersebut telah dipulihkan dengan penetapan piutang, Pelaksanaan pekerjaan pada 8 (delapan) OPD/SatKer tidak sesuai kontrak, yang meliputi kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran.

Selain itu, BPK-RI Sumut (2021) juga mengklarifikasi persoalan ketidakpatuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun kali ini menyampaikan temuan masalah yang terjadi di Kota Medan, terhadap ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan (penerapan standar akuntansi pemerintah) dan sistem pengendalian internal, antara lain: Pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Dinas Pendidikan (Disdik) belum tertib dan terdapat sisa dana BOS pada SMK dan SMA Negeri belum disajikan pada LK minimal sebesar Rp 1,09 miliar, Inventarisasi dan verifikasi faktual aset dalam rangka pengalihan Personil, Prasarana dan Dokumen (P2D) belum memadai serta pencatatan dan penatausahaan aset tetap belum tertib, Temuan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan antara lain pembayaran belanja perjalanan dinas pada Sekretariat Dewan (Setwan) dan Disdik tidak sesuai fakta sebenarnya sebesar Rp 5,47 miliar. Dari jumlah itu telah dipulihkan dengan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp 3,19 miliar, Ditemukan juga

pelaksanaan volume pada 21 pekerjaan di empat satker atau OPD tidak sesuai kontrak sebesar Rp 5,47 miliar. Dari jumlah itu telah dipulihkan dengan pengembalian ke kas daerah sebesar Rp 1,31 miliar, Aset tetap yang diserahkan berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, tidak diketahui keberadaannya, tidak diatribusikan ke aset induknya, dan tidak diketahui pemiliknya, Aset tetap tanah seluas 51.000 m² dengan bangunan gedung kantor eks BP-BPWS di atasnya tidak termasuk dalam aset yang diserahkan, belum tercatat pada neraca, serta belum jelas status kepemilikannya.

Anggota BPK RI V Isma Yatun menjelaskan bahwa tujuan melihat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bukan untuk mencari bukti kesalahan pengelolaan keuangan. Namun demikian, jika ditemukan penyimpangan, kecurangan, atau pelanggaran aturan selama pemeriksaan, terutama yang berdampak pada kemungkinan kerugian negara, temuan tersebut akan tetap didokumentasikan dan dipublikasikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (BPK-RI, 2018).

Isma Yatun juga menyatakan di gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, "Opini (WTP) yang ditawarkan oleh pemeriksa adalah pernyataan profesional untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan, bukan janji bahwa tidak ada penipuan yang ditemui (BPK-RI, 2018). Kesimpulan yang dapat ditarik dari peristiwa di atas adalah bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan telah menemukan masalah dengan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal yang membutuhkan perhatian segera dan pencarian solusi.

Hal-hal yang menghambat pelaksanaan SPIP juga terungkap dalam beberapa penelitian tentang sistem pengendalian intern pemerintah, khususnya dalam penelitian (Zumriyatun, 2010) yang sampai pada kesimpulan bahwa tanggung jawab pelaksanaan dan keberhasilan SPIP di daerah sangat tergantung pada komitmen Kepala Daerah masing-masing. Dan menurut penelitian Rahmi (2014), ada sejumlah alasan mengapa penerapan SPIP di wilayah X tidak efektif, antara lain: kurangnya pemahaman pimpinan instansi tentang nilai pengendalian internal, kurangnya keakraban para karyawan, kesalahan yang dilakukan baik oleh karyawan maupun pemimpin, dan kemampuan manajemen atas untuk tidak mematuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan temuan penyajian mengenai fenomena yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dimungkinkan untuk menentukan bagaimana penggunaan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terkait dengan kualitas laporan keuangan. Maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BKAD Kota Medan)”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Persoalan yang dapat dijabarkan, dari latar belakang permasalahan di atas, adalah masih banyaknya temuan BPK RI tentang pelanggaran dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan, yang meliputi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan temuan masalah sistem pengendalian internal.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis hanya membatasi penelitian ini pada variabel bebas dan terikat. Variabel bebas (mempengaruhi) diantaranya yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), Sedangkan variabel terikat (dipengaruhi) yaitu Kualitas Laporan Keuangan, yang akan diteliti oleh penulis dengan responden para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan.

1.4. Rumusan Masalah

Topik yang akan dikaji memiliki rumusan masalah sebagai berikut berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan:

1. Apakah terdapat pengaruh variabel penerapan standar akuntansi pemerintah secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan BKAD Kota Medan?
2. Apakah terdapat pengaruh variabel Sistem Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BKAD Kota Medan?
3. Apakah terdapat pengaruh variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BKAD Kota Medan?

1.5. Tujuan Penelitian

Dalam rumusan masalah di atas. Berikut ini adalah tujuan yang harus dipenuhi untuk penelitian ini:

1. Untuk mengidentifikasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BKAD Kota Medan

2. Untuk mengidentifikasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BKAD Kota Medan
3. Untuk mengidentifikasi Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan di BKAD Kota Medan.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pengalaman dan keterampilan dalam melakukan penelitian empiris yang melibatkan pengumpulan data primer dan analisis statistik.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi instansi pemerintah dalam meningkatkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal dalam pengelolaan keuangan, sehingga dapat memperbaiki kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pengembangan kebijakan dan strategi dalam penerapan standar akuntansi dan sistem pengendalian internal yang lebih baik dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada penelitian selanjutnya

dalam bidang akuntansi sektor publik dengan mengembangkan kerangka konseptual yang lebih baik dalam menggambarkan hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperluas cakupan dan mendalami pemahaman mengenai pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan

a. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah berkualitas tinggi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) dapat diandalkan; (b) relevan; (c) dapat dipahami; dan (d) dapat dibandingkan. Laporan keuangan dapat dianggap sebagai data dan informasi. Jika diberi konteks yang memberikan makna, sebuah data dapat diubah menjadi sebuah informasi (Lillrank, 2003).

Istilah "keuangan negara" mengacu pada semua hak dan tanggung jawab negara yang dapat dinilai moneter, serta semua item yang dapat diubah menjadi milik negara sehubungan dengan pelaksanaan dalam hak dan kewajiban tersebut, apakah itu dalam bentuk uang atau benda fisik. Dari segi objek, yang dimaksud dengan "keuangan negara" meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dibayar dengan uang, termasuk kebijakan dan praktik fiskal, moneter, dan manajemen aset, serta apa saja yang dapat diubah menjadi milik negara sehubungan dengan pencapaian hak dan kewajiban tersebut. Dari segi subjek yang dimaksud "keuangan negara" mengacu pada segala sesuatu yang dipegang oleh negara, berada di bawah kendalinya, atau terkait dengan keuangan negara. Ini termasuk semua objek yang disebutkan di atas seperti pemerintah daerah,

perusahaan negara / regional, dan entitas lainnya. Dari segi proses, “keuangan negara” mencakup berbagai proses terkait manajemen yang lengkap, mulai dari pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga akuntabilitas, dalam hal kegiatan. Dalam segi tujuan, “keuangan negara” mencakup semua peraturan, tindakan, dan kontrak hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan/atau pengelolaan aset yang tercantum dalam kerangka tata kelola negara. (Harahap et. al. 2017).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kualitas sebagai (1) sejauh mana sesuatu itu baik atau buruk dan (2) tingkat atau derajatnya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, laporan keuangan biasanya berisi data yang berguna bagi mereka yang harus membuat keputusan dan menunjukkan bahwa lembaga pelaporan bertanggung jawab atas sumber daya yang diberikan kepada mereka (Nordiawan dan Hertianti, 2011). Tujuan dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat. Masyarakat umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kreditor atau investor, pejabat tinggi pemerintah, dan organisasi internasional semuanya memerlukan laporan ini.

Dari justifikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat baik dan buruknya suatu laporan keuangan pemerintah daerah adalah kualitas laporan keuangan daerah, yang seharusnya menunjukkan akuntabilitas entitas pelapor dan memenuhi tuntutan penggunaannya.

b. Kriteria/Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa aspek kualitatif laporan keuangan adalah

pengukuran normatif yang harus dimasukkan ke dalam informasi akuntansi agar dapat mencapai tujuannya. Agar laporan keuangan pemerintah memiliki kualitas yang diperlukan, empat persyaratan normatif berikut harus dipenuhi:

1) Relevan (Relevance)

Laporan keuangan dianggap relevan jika data yang mereka berikan dapat mempengaruhi penilaian pengguna saat menilai kejadian di masa lalu atau sekarang. Berikut ini adalah beberapa data terkait:

- a) Memiliki manfaat umpan balik (Feedback Value) Pengguna dapat mengonfirmasi atau menyesuaikan harapan mereka sebelumnya menggunakan informasi.
- b) Memiliki manfaat prediktif (Predictive Value) Dengan menggunakan data dari masa lalu dan masa kini, pengguna dapat membuat prediksi tentang masa depan.
- c) Tepat waktu (Timeliness) Informasi disampaikan dengan segera sehingga dapat berdampak dan membantu ketika mengambil keputusan.
- d) Lengkap (Complete) Data akuntansi keuangan untuk pemerintah disediakan selengkap mungkin, termasuk semua data akuntansi yang dapat mempengaruhi keputusan dengan memperhitungkan batas saat ini. Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan informasi ini, informasi yang mendasari setiap informasi utama dalam laporan keuangan dibuat transparan.

2) Andal (Reliable)

Informasi laporan keuangan dianggap dapat diandalkan jika bebas dari kesalahan substansial dan wawasan yang menyesatkan. Data yang andal harus

memenuhi persyaratan.

a) Penyajian Jujur (Representational Faithfulness)

Materi tersebut secara akurat menggambarkan transaksi serta peristiwa tambahan apa pun yang perlu diungkapkan atau mungkin telah diantisipasi secara wajar untuk diungkapkan.

b) Dapat Diverifikasi (Verifiability)

Informasi akun keuangan dapat diuji, dan bahkan jika pihak yang berbeda melakukan tes, temuannya tidak akan berbeda secara signifikan.

c) Netralitas (Neutral)

Informasi tidak memprioritaskan kebutuhan salah satu pihak di atas kebutuhan masyarakat luas.

3) Dapat dibandingkan (Comparable)

Informasi yang ditemukan dalam laporan keuangan lebih membantu jika dapat dibandingkan dengan informasi dari periode sebelumnya atau dengan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami (Understandable)

Jika bentuk dan bahasa yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan disesuaikan dengan berbagai aplikasi yang dapat digunakan pengguna, maka informasi dalam laporan keuangan dapat dipahami. Tindakan operasi entitas pelapor dianggap diketahui oleh pengguna.

Sifat ini berfungsi sebagai indikator dan alat ukur keakuratan laporan keuangan dalam penggunaannya.

c. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat bagi pengguna untuk membuat dan menilai keputusan alokasi sumber daya dengan memberikan informasi tentang posisi keuangan entitas pelaporan, realisasi anggaran, saldo anggaran berlebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas. Pelaporan keuangan pemerintah secara khusus dimaksudkan untuk menyajikan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas dana yang dipercayakan kepadanya. Diantaranya:

- 1) Menjelaskan status keuangan pemerintah, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitasnya.
- 2) Menjelaskan setiap perubahan pada posisi sumber daya keuangan, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- 3) Mendeskripsikan sumber, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi.
- 4) Memberikan rincian apakah anggarannya telah direalisasikan.
- 5) Menjelaskan dari mana sumber pendanaan dan persyaratan arus kas entitas pelapor.
- 6) Mendeskripsikan bagaimana pemerintah mampu membiayai pelaksanaan inisiatif pemerintah.
- 7) Menyediakan data terkait untuk menilai kapasitas entitas pelaporan untuk membayar operasinya.

Selain itu, tujuan umum laporan keuangan memiliki fungsi prediktif dan prospektif, menawarkan data yang bermanfaat untuk memperkirakan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan oleh operasi berkelanjutan, dan risiko dari ketidakpastian yang terkait dengan sumber daya tersebut. Pengguna juga dapat memperoleh informasi dari

pelaporan keuangan tentang:

- 1) Pernyataan apakah sumber daya diperoleh dan dimanfaatkan sesuai anggaran.
- 2) Pernyataan apakah sumber daya diterima dan digunakan sesuai dengan aturan, termasuk batas pengeluaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

d. Entitas Pelaporan Keuangan

Untuk alasan berikut, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya yang dilakukan dan hasil yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan dalam suatu periode pelaporan:

- 1) Akuntabilitas

Bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya entitas pelaporan dan melaksanakan kebijakan yang ditugaskan kepadanya untuk mencapai tujuan berulang.

- 2) Manajemen

Membantu pengguna mengevaluasi seberapa baik entitas pelaporan menjalankan operasinya selama periode pelaporan untuk mempermudah perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian semua aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kebaikan masyarakat.

- 3) Transparansi

Memberikan akses kepada publik terhadap informasi keuangan yang terbuka dan jujur didasarkan pada gagasan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui dengan tepat seberapa akuntabel pemerintah untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan untuk mematuhi hukum dan peraturan.

4) Keseimbangan antar generasi

Membantu pengguna dalam memahami apakah generasi mendatang diasumsikan berkontribusi pada beban pengeluaran ini, berapa banyak uang yang tersedia pemerintah untuk membiayai semua pengeluaran yang dialokasikan selama periode pelaporan, dan apakah ini masalahnya.

5) Evaluasi Kinerja

Menganalisis kinerja entitas pelaporan, dengan memberikan perhatian khusus pada bagaimana mereka menggunakan sumber daya keuangan di bawah kendali pemerintah untuk mencapai tujuan kinerja mereka.

a) Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berikut ini adalah komponen utama laporan keuangan pemerintah daerah:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran, yaitu jenis laporan keuangan yang memberikan gambaran umum tentang sumber, distribusi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang ditangani oleh pemerintah federal atau lokal dan membandingkan proyeksi anggaran dengan hasil aktual untuk periode pelaporan.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran, yaitu dokumen yang merinci naik atau turunnya saldo anggaran untuk tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- 3) Neraca, yaitu menjelaskan aset, kewajiban, dan ekuitas entitas pelapor sehubungan dengan kondisi keuangannya pada tanggal tertentu.
- 4) Laporan Operasional, yaitu laporan yang memberikan gambaran umum tentang sumber daya keuangan yang berkontribusi pada ekuitas dan bagaimana mereka digunakan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk tugas-tugas tata kelola dalam periode pelaporan.

- 5) Laporan Arus Kas, yaitu laporan yang merinci saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat dan daerah selama periode waktu tertentu dan mencakup informasi tentang operasi, investasi, pembiayaan, dan kegiatan sementara.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan tersebut merinci setiap perubahan ekuitas dari tahun sebelumnya, apakah itu positif atau negatif.
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu menawarkan penjelasan naratif atau rincian data yang termasuk dalam Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Kelebihan Anggaran.

b) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan penelitian terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi reliabilitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi reliabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah:

1) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kapasitas yang dimiliki oleh seorang karyawan sangat erat kaitannya dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang dibutuhkan yang biasa dikenal dengan kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kompeten akan mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat dan efektif. Penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu akan didukung dengan kehadiran sumber daya manusia yang kompeten. Menurut Pujanira (2017) bahwa kualitas laporan keuangan yang dihasilkan untuk pemerintah daerah meningkat dengan

kompetensi sumber daya manusia dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah yang baik. Di sisi lain, jika sumber daya manusia tidak kompeten, dapat mengakibatkan laporan keuangan menurun bagi pemerintah daerah.

2) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Untuk memahami dengan benar prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam membuat dan menyajikan akun keuangan pemerintah daerah, perlu diterapkan standar akuntansi pemerintah. Menurut Artana (2016) Penting untuk menyiapkan pedoman akuntansi. Hal ini menjadi lebih penting mengingat seberapa cepat perusahaan publik harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang mencakup informasi keuangan. Jadi, semakin besar kualitas laporan keuangan yang diberikan oleh pemerintah daerah, maka akan semakin besar pula seseorang yang memahami standar akuntansi pemerintah.

3) Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Agustiawan dan Rasmini (2016), bahwa kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan meningkat berbanding lurus dengan efektivitas sistem pengendalian intern.

2.1.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Diperlukan pemahaman PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan keuangan/aset yang lebih terbuka dan akuntabel, serta untuk memberikan metrik kinerja yang lebih baik, diperlukan untuk penerapan standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun dan disajikan dengan menggunakan prinsip akuntansi, yang dikenal sebagai standar akuntansi pemerintah.

b. Basis Standar Akuntansi Pemerintah

Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) di Indonesia sepenuhnya mengembangkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual pada tahun 2010, yang dituangkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dasar akrual telah menjadi metode akuntansi yang disukai. Pasal 4 ayat 1 dan 2 membuat hal ini sangat jelas dengan ayat.:

“Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual”. “SAP Berbasis Akrual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam bentuk PSAP”.

Lebih lanjut pada ayat 4 dinyatakan bahwa: “PSAP sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tercantum dalam Lampiran I yang tidak dapat terpisahkan dari peraturan pemerintah ini”.

Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, yang dijelaskan dalam Lampiran I, terdiri dari Kerangka Konseptual dan 12 Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Pasal 10 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah

Daerah, pelaporan keuangan pemerintah secara bertahap diperkenalkan untuk menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk melaksanakan aturan tersebut. Menurut undang-undang ini, pemerintah daerah harus mulai menggunakan SAP yang berbasis akrual selambat-lambatnya sampai tahun anggaran 2015.

SAP berbasis akrual mencatat pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan dasar yang ditetapkan dalam APBD, dan mencatat pendapatan, pengeluaran, aset, utang, dan ekuitas dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akrual.

Sesuai dengan peluncuran draf SAP (exposure draft), ketika suatu dana menggunakan dasar akrual untuk neracanya, terlepas dari kapan kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat transaksi atau kapan pun saat peristiwa atau kondisi lingkungan berdampak pada keuangan pemerintah. International Monetary Fund (IMF), sebagai organisasi pemberi pinjaman, menyusun Government Finance Statistics (GFS) Di mana ia menyarankan untuk menggunakan akuntansi berbasis akrual ketika menyiapkan laporan keuangan untuk negara-negara debiturnya. Alasan untuk adopsi basis akrual ini, karena waktu perekaman sesuai dengan saat terjadinya aliran sumber daya. Akibatnya, basis akrual menawarkan perkiraan yang akurat tentang bagaimana kebijakan pemerintah akan mempengaruhi ekonomi makro. Selain itu, basis akrual menawarkan informasi yang paling menyeluruh karena memungkinkan pencatatan transaksi internal serta seluruh aliran sumber daya.

Pemangku kepentingan (Stakeholder) berikut dimungkinkan oleh informasi yang diberikan dalam pelaporan keuangan menggunakan akuntansi berbasis akrual:

- 1) Mengevaluasi operasi, keuangan, dan arus kas perusahaan

- 2) Membuat pilihan pada alokasi sumber daya atau melakukan bisnis dengan organisasi
- 3) Menentukan siapa yang bertanggung jawab atas manajemen dan penyebaran sumber daya entitas.

Pelaporan dengan basis akrual akan dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola kegiatannya dan menangani setiap kebutuhan yang mungkin timbul.
- 2) Untuk memungkinkan individu menggunakan laporan tersebut untuk menilai kemampuan pemerintah pada saat itu untuk melaksanakan kegiatannya saat ini dan untuk menjunjung tinggi komitmen dan nilai-nilainya.
- 3) Umumkan posisi mata uang pemerintah dan setiap perubahan pada mata uang tersebut.
- 4) Memberikan motivasi kepada pemerintah untuk menentukan keberhasilan daya sumber yang telah dikelola dan
- 5) Bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya

c. Indikator Standar Akuntansi Pemerintah

Berikut daftar indikator standar akuntansi pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

- 1) PSAP Nomor 01 Penyajian Laporan Keuangan

Untuk menawarkan informasi terkait tentang transaksi dan situasi keuangan bisnis selama periode laporan keuangan disiapkan. Laporan keuangan sebagian besar digunakan untuk menentukan kepatuhan entitas terhadap hukum dan peraturan, mengukur status keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam operasi. Prinsip akuntansi akrual dan kas digunakan untuk mencatat transaksi dan kejadian dalam rangka menghasilkan laporan keuangan. Informasi laporan keuangan dimaksudkan untuk memenuhi

tuntutan pengguna dalam pengambilan keputusan dan penilaian akuntabilitas.

2) PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran berbasis Kas

Laporan realisasi anggaran adalah dokumen yang merinci LRA-pendapatan, pengeluaran, transfer, surplus/defisit LRA, dan pembiayaan entitas pelapor dan membandingkannya dengan anggarannya. Dalam menghitung sumber daya ekonomi yang akan diperoleh untuk membiayai kegiatan pemerintahan ke depan, pelaporan ini menawarkan informasi yang bermanfaat. Saat membuat laporan realisasi anggaran, akuntansi berbasis akrual digunakan, dan prinsip-prinsip kotor digunakan untuk mencatat pendapatan.

3) PSAP Nomor 03 Laporan Arus Kas

Salah satu komponen laporan keuangan yang merinci pendapatan dan pengeluaran kas selama periode waktu tertentu adalah laporan arus kas. Operasi operasi, investasi, dana, dan transaksi lainnya adalah berbagai kategori yang digunakan untuk mengatur data dalam laporan ini. Menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan menggunakan metode langsung untuk mencatat arus kas dari operasi operasi adalah bagaimana laporan arus kas dibuat.

4) PSAP Nomor 04 Catatan atas Laporan Keuangan

Semua pembaca harus dapat memahami catatan atas laporan keuangan, tidak hanya kelompok kecil atau manajemen entitas pelaporan. Penting untuk memberikan catatan laporan keuangan secara terstruktur dan metodis. Nilai suatu item yang dilaporkan dalam laporan keuangan seperti laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran berlebih, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas dijelaskan, dicantumkan dengan sangat rinci, atau

dianalisis dalam catatan atas laporan keuangan. Tujuan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai justifikasi butir-butir dalam laporan keuangan untuk setiap periode pelaporan.

5) PSAP Nomor 05 Akuntansi Persediaan

Ketika suatu entitas memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur secara akurat dan menarik kemungkinan keuntungan ekonomi di masa depan, inventaris diakui. Ketika sebuah perusahaan memperoleh kepemilikan atau kendali atas inventaris, itu dicatat. Pada akhir periode akuntansi, hasil persediaan fisik digunakan untuk mencatat persediaan sebagai bagian dari pengakuan proses akuntansi persediaan.

6) PSAP Nomor 06 Akuntansi Investasi

Jika pengeluaran uang tunai atau aset memenuhi salah satu persyaratan berikut, itu dapat diklasifikasikan sebagai investasi:

- 1) Pemerintah mungkin dapat memperoleh keuntungan atau layanan ekonomi dan sosial di masa depan dengan imbalan investasi.
- 2) Dimungkinkan untuk memperkirakan secara akurat nilai pembelian atau nilai wajar investasi. Beban investasi jangka pendek diklasifikasikan sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak termasuk dalam laporan realisasi anggaran, tetapi pengeluaran investasi jangka panjang diklasifikasikan sebagai pengeluaran keuangan. Pengakuan akuntansi investasi adalah proses mengklasifikasikan uang yang telah diinvestasikan setelah digunakan dengan harapan keuntungan finansial di masa depan.

7) PSAP Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap

Dalam akuntansi, aset tetap dikategorikan menurut jenis operasi yang dilakukan organisasi. Tanah, peralatan dan mesin, struktur dan struktur, bangunan dan struktur, jalan, dan konstruksi yang sedang berlangsung adalah contoh aset tetap. Ketika nilai atau biaya aset tetap dapat ditentukan secara akurat dan memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi di masa depan, itu diakui seperti itu. Aset tetap yang diakui itu harus nyata, memiliki manfaat yang bertahan lebih dari satu tahun, dapat diukur dalam hal biaya akuisisi, tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi reguler entitas, dan dibeli atau digunakan dengan maksud untuk menggunakannya agar dapat dicatat sebagai aset tetap. Pencatatan atau penilaian aset tetap dengan biaya akuisisi mereka, serta pengelompokan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam jenis atau tujuan dalam operasi perusahaan, merupakan pengakuan akuntansi aset tetap.

8) PSAP Nomor 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Jalan, sistem irigasi, jaringan, bangunan, dan aset tetap lainnya yang proses pembelian dan konstruksinya memakan waktu dan belum selesai semuanya dianggap sedang dibangun. Jika salah satu dari kondisi berikut terpenuhi, maka hal yang nyata dianggap sedang dibangun oleh Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

- a) Kemungkinan keuntungan ekonomi aset di masa depan akan terwujud.
- b) Dimungkinkan untuk mengukur biaya akuisisi dengan akurat.
- c) Pekerjaan lebih lanjut sedang dilakukan pada aset.

Pada akhir periode akuntansi, informasi konstruksi dalam pekerjaan diungkapkan, dan konstruksi dalam pekerjaan ditransfer ke aset tetap yang relevan.

9) PSAP Nomor 09 Akuntansi Kewajiban

Ketika suatu entitas memiliki kewajiban yang diharapkan memerlukan penggunaan sumber daya ekonomi untuk memenuhinya dan nilai penyelesaian kewajiban tersebut dapat ditentukan secara akurat dan kewajiban harus diakui. Liabilitas dicatat pada nilai nominal dan diakui saat muncul sebagai bagian dari presentasi akuntansi kewajiban.

10) PSAP Nomor 10 Koreksi Kesalahan

Untuk memastikan bahwa item dalam akun keuangan sebagaimana mestinya, koreksi adalah tindakan korektif. Koreksi akan dilakukan pada akun yang bersangkutan dalam periode yang sama apabila terdapat kesalahan yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi kas tetapi tidak terulang pada periode berjalan. Meskipun demikian, perbaikan dikeluarkan untuk akun yang bersangkutan dalam periode berjalan jika kesalahan terjadi pada periode sebelumnya dan berdampak atau tidak mempengaruhi uang tunai. Sehubungan dengan standar akuntansi keuangan, perawatan perbaikan kesalahan dilakukan dengan memperbaiki kesalahan dengan penyesuaian pada item neraca terkait pada periode di mana kesalahan ditemukan.

11) PSAP Nomor 11 Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan Keuangan Konsolidasian mencakup berbagai laporan, termasuk Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAI, Laporan Operasional, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Untuk menunjukkan status keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi yang terhubung dengan pemerintah daerah, Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan.

12) PSAP Nomor 12 Laporan Operasional

Pemerintah pusat/daerah mengatur laporan operasional untuk keperluan tata kelola. Mereka adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran umum tentang sumber daya ekonomi yang digunakan selama periode pelaporan untuk meningkatkan ekuitas. Laporan Operasional mencakup bagian tentang pendapatan, biaya, transfer, dan transaksi yang tidak biasa. Laporan Operasional sedang disajikan untuk mempromosikan kesetaraan dan memberikan gambaran umum tentang bagaimana pemerintah daerah menggunakan dan mengelola sumber daya keuangan mereka.

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal

a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian intern merupakan prosedur penting dalam tindakan dan kegiatan yang secara konsisten dilakukan oleh seluruh pegawai dan pimpinan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi tercapai melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang dapat dipercaya, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memberikan keyakinan yang cukup bahwa operasi telah dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan secara efektif dan efisien, pengawasan internal mencakup seluruh proses audit, reviewing, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap realisasi tugas dan fungsi organisasi.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan harus berada di bawah

kewenangan menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota agar pengelolaan keuangan negara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pedoman SPIP, yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, diterapkan dalam pengendalian ini. Tujuan SPIP adalah untuk memberikan kepercayaan yang cukup kepada masyarakat akan efektivitas dan efisiensi dalam memenuhi tujuan tata kelola negara, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset publik, dan kepatuhan hukum dan peraturan.

c. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Berikut daftar indikator sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008:

1) Lingkungan Pengendalian

Untuk menerapkan sistem pengendalian internal di tempat kerja mereka dan untuk mendorong perilaku positif, para pemimpin lembaga pemerintah harus membangun dan memelihara lingkungan kontrol berikut:

- a) Mempertahankan prinsip-prinsip moral dan etika
- b) Berkomitmen pada kompetensi
- c) Memiliki kepemimpinan yang suportif
- d) Menciptakan struktur organisasi yang memenuhi kebutuhan bisnis
- e) Pendelegasian kekuasaan dan tanggung jawab yang tepat
- f) Pembuatan dan pelaksanaan strategi pengembangan sumber daya manusia yang tepat guna
- g) Pengakuan akan pentingnya sistem pengendalian internal yang efisien bagi pemerintah
- h) Kolaborasi yang efektif dengan lembaga pemerintah terkait

Standar Operasional Prosedur (SOP), yang merupakan instruksi tertulis, digunakan untuk menerapkan lingkungan kontrol dalam sistem pengendalian

internal.

2) Penilaian Resiko

Penilaian risiko diperlukan dari para pemimpin lembaga pemerintah. Dua komponen penilaian risiko adalah identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam konteks penilaian risiko, eksekutif organisasi pemerintah memutuskan:

- a) Tujuan organisasi instansi pemerintah
- b) Tujuan tingkat aktivitas yang diatur oleh peraturan dan perundang-undangan.
- c) Peraturan perundang-undangan.
- d) Identifikasi resiko
- e) Analisis resiko
- f) Pengelolaan risiko selama perubahan semuanya disertakan

Menerapkan penentuan batas dan penentuan toleransi pada penilaian risiko adalah bagaimana sistem pengendalian internal menangani risiko.

3) Kegiatan Pengendalian

Ukuran, kompleksitas, dan sifat tanggung jawab dan operasional instansi pemerintah yang bersangkutan semuanya harus dipertimbangkan oleh pimpinan instansi tersebut ketika melakukan kegiatan pengendalian. Ciri-ciri berikut hadir dalam pelaksanaan kegiatan kontrol:

- a) Kegiatan pengendalian harus diprioritaskan daripada fungsi inti instansi pemerintah sesuai dengan aturan
- b) Kegiatan tersebut harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko
- c) Mereka harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus agensi
- d) Kebijakan dan prosedur harus dibuat secara tertulis
- e) Prosedur yang ditetapkan harus diikuti sebagaimana ditentukan secara tertulis
- f) Kegiatan pengendalian harus dievaluasi secara berkala untuk menentukan apakah masih diperlukan

Kegiatan pengendalian dalam sistem pengendalian intern dilakukan dengan

melaksanakan pengendalian intern dan manajemen pengendalian internal. Pelaksana dan pengelolaan risiko yang terkait dengan kegiatan pengendalian adalah bagaimana sistem pengendalian internal melaksanakan operasi pengendaliannya. risiko dan kegiatan pengendaliannya.

4) Informasi dan Komunikasi

Pemimpin lembaga pemerintah dituntut untuk menemukan, mengumpulkan, dan mendistribusikan informasi dalam format yang tepat pada waktu yang tepat. Penyebaran informasi harus dilakukan secara efisien. Eksekutif tingkat atas lembaga pemerintah harus, setidaknya:

- a) Pemimpin lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk menentukan informasi yang tepat untuk dibagikan, dicatat, dan dikomunikasikan pada waktu yang tepat.
- b) Berbagi informasi perlu dilakukan secara efisien.
- c) Mengelolla, mengembaangkan, dan memmperbarui sistem komunikasi secara terus menerus.

Penerapan sistem informasi memungkinkan penanganan informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal.

5) Pemantauan Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern harus diawasi oleh pimpinan instansi pemerintah. Pemantauan sistem pengendalian internal dilakukan dengan menggunakan:

a) Pemantauan yang berkelanjutan

diselenggarakan melalui praktik manajemen standar, pengawasan, perbandingan, rekonsiliasi, dan operasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas

b) Evaluasi yang terpisah

Dilakukan dengan melakukan evaluasi diri, review, dan uji efektivitas sistem pengendalian intern. Sistem pengawasan internal pemerintah atau organisasi pemerintah di luar dapat melakukan evaluasi independen. Daftar tes pengendalian internal dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan yang berbeda.

- c) Penyelesaian audit atau tindak lanjut dari rekomendasi hasil audit dan review lainnya

Harus segera dilakukan dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk melaksanakan rekomendasi untuk hasil audit dan tinjauan lainnya. Menerapkan sistem akuntansi yang memungkinkan audit dan melakukan audit dadakan terhadap catatan akuntansi pada titik yang tidak ditentukan dalam waktu kepemimpinan adalah metode pemantauan pengendalian internal.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggambarkan bagaimana hipotesis yang dirumuskan dan banyaknya variabel penelitian yang saling berhubungan satu sama lain. Untuk tujuan melaporkan hipotesis dan wawasan baru tentang penyelidikan teoretis, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Studi ini dan studi sebelumnya memiliki persamaan karena keduanya menyelidiki apakah sistem pengendalian internal dan aturan akuntansi pemerintah memiliki dampak substansial pada kaliber laporan keuangan.

Sedangkan yang membedakan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah diantara lain variable yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yang dimana berbeda dengan penelitian terdahulu yang menggunakan 2 atau lebih variable. Adapun ringkasan yang dapat dilihat pada table dibawah mengenai kesimpulan peneliti terdahulu, sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	T. Asri Yunita (2015)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), dan Kompetensi Staf Akuntansi (X3) Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai 2. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai. 3. Kompetensi Staf Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
2.	Ade Saputra (2015)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Sistem Pengendalian Intern (X2), dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3) Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. Penerapan Standar Akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 2. Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 3. Kompetensi SDM berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan
3.	Eka Nurmala Sari, Muhsyaryah dan Sri wahyuni (2019)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Ketersediaan Anggaran terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Se	Sistem Pengendalian Intern (X1), Ketersediaan Anggaran (X2) Efektivitas Penerapan Sistem (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi penerapan sistem informasi keuangan daerah di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Sumatera Utara dipengaruhi oleh struktur pengendalian

		Sumatera Utara		internal pemerintah dan ketersediaan anggaran.
4.	Putri Syukria Lubis (2018)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan (Y)	1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan PD. Pasar Kota Medan. 2. Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan PD. Pasar Kota Medan
5.	Ponjaya Tri Handayani (2015)	Pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi empiris BPKAD Kabupaten Kubu Raya)	Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik (X1) Pengawasan kualitas laporan keuangan (X2) Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y)	Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap keakuratan laporan keuangan berdampak positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara bersamaan dan sebagian.
6.	Zulia Hanum, Hafsah, Pandapotan Ritonga (2021)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Kampus Islam Swasta di Kota Medan	Sistem Pengendalian internal (X1), Kinerja Kampus Islam Swasta (Y)	Tidak pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kinerja kampus islam di Kota Medan. Bahwa SPI hanya sebagai syarat dalam penyusunan borang akreditasi sebagai salah satu indicator kinerja PTS.
7.	Januri (2021)	Peranan Sistem Pengendalian Intern, Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Persediaan	Sistem Pengendalian Intern (X1) , Efektivitas dan Efisiensi Persediaan (Y).	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Sistem Pengendalian Intern Persediaan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Tonduhan yang didasarkan pada teori yang relevan terhadap masalah yang diteliti pada PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Tonduhan penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Sistem

				informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Tonduhan masih belum efektif yakni mengenai tidak tercatatnya harga satuan barang pada dokumen daftar pemeriksaan persediaan barang yang dapat di khawatirkan terjadinya fraud dan masih kurangnya unsur pemantauan pengendalian internal pada karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Tonduhan.
8.	Eka Nurmala Sari, Fitriani Saragih (2009)	Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan Pada Hotel Berbintang Di Kota Medan	Sistem Pengendalian Manajemen (X1), Kinerja Keuangan (Y)	Melalui nilai koefisien regresi 0,313, prosedur pengendalian manajemen sebagian memiliki dampak yang menguntungkan terhadap kinerja hotel bintang di Kota Medan. Ini menyiratkan bahwa semakin efektif metode kontrol manajemen di hotel mewah, semakin sukses bisnisnya.
9.	Astika Rahmawati, I Wayan Mustika, Lilik Handaya Eka (2018)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada SKPD Kota Tangerang Selatan	Penerapan Sistem Akuntansi (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), Sistem Pengendalian Internal (X3), Kualitas Laporan Keuangan (Y).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan standar akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 3. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
10.	Hafsah, Rahdhansyah, Hasan Sakti Siregar (2017)	Analisis Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (X1), Pemerintah Daerah (Y)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelemahan sistem pengendalian intern terbagi ke dalam tiga bagian yaitu kelemahan sistem

				<p>pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern.</p> <p>2. Dalam kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan yang paling utama adalah kelemahan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), atau tepatnya sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.</p> <p>3. Kelemahan lain dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan adalah Pemerintah Daerah terlambat menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).</p> <p>4. Kelemahan dalam sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang paling menonjol adalah kelemahan dalam pengelolaan fisik aset.</p> <p>5. Dalam hal struktur pengendalian intern, kelemahan yang paling utama adalah Standar Operasional Prosedur (SOP)</p>
--	--	--	--	---

				yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati.
--	--	--	--	---

2.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori di atas yang hasilnya semua berpengaruh dan didukung oleh peneliti terdahulu, maka disimpulkan kerangka berpikir konseptual sebagai berikut :

1. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (X) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Pemerintah daerah harus membuat laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan undang-undang pada tahun 2015 menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah secara umum. Standar Akuntansi Pemerintah adalah kriteria yang berlaku untuk menyusun laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah harus dipatuhi untuk menjamin bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kaliber tertinggi (Rahayu, dkk., 2014). Pada penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2015) menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintahan Daerah Kota Dumai. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Modo, et. al. (2016) menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (X) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

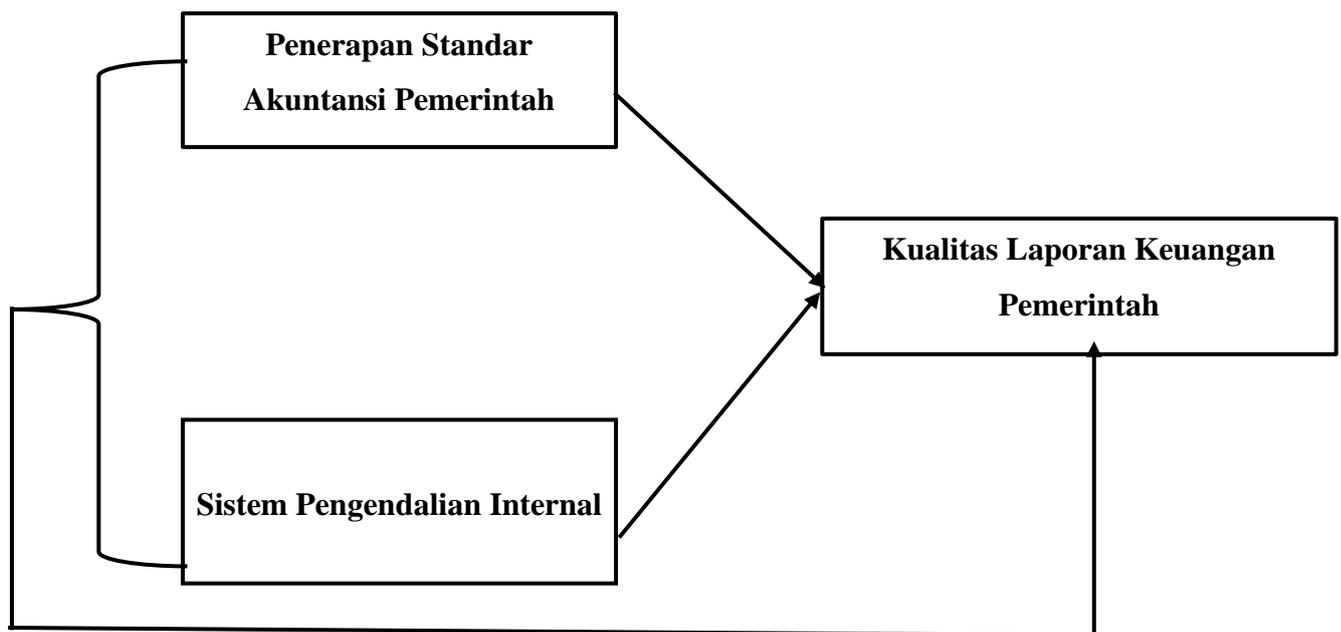
Untuk mendorong tata kelola yang baik dalam kegiatan yang efektif dan efisien, sistem pengendalian internal memberikan jaminan yang cukup bahwa

tindakan telah dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Selain itu, sistem melakukan audit, peninjauan, evaluasi, pemantauan, dan operasi pengawasan lainnya dari seluruh tanggung jawab dan fungsi organisasi untuk menjamin keakuratan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan demikian, akurasi laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara memadai (Simbolon, 2013:61). Pada penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2015) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Syukria (2018) menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Internal (X) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Adalah tugas pemerintah daerah untuk secara sistematis mengelola dan melaporkan penggunaan uang selama periode pelaporan yang ditentukan. Sumber daya manusia yang paham dan mahir dalam akuntansi diperlukan untuk mengelola keuangan daerah dan membuat akun keuangan yang benar. Selain itu, sistem akuntansi keuangan daerah yang kuat harus diterapkan untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kaliber tinggi. Untuk menghasilkan akun keuangan yang berkualitas, pemerintah daerah juga harus secara akurat dan tepat mempertanggungjawabkan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Ikyarti, Aprilla, 2019). Akibatnya, dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal dan Dampak Penerapan Peraturan Akuntansi Pemerintah Bersama-sama Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Hipotesis berikut diambil dari teori yang disebutkan di atas, yang temuannya semuanya signifikan:

Ha₁ : Terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

H0₁ : Tidak terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Ha₂ : Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

H0₂ : Terdapat pengaruh sistem pengendalian internal secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Ha₃ : Terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan

H0₃ : Tidak terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode kuantitatif diterapkan. Menurut definisi penelitian, yang juga dapat didefinisikan sebagai "penelitian yang meneliti hubungan kausal antara dua atau lebih fenomena," penelitian ini mengambil bentuk penelitian asosiatif dan menjelaskan jenis kausalitas tertentu, yaitu dampak variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintah mempengaruhi akurasi akun keuangan pemerintah daerah (Sugiyono, 2016).

3.2 Definisi Operasional Variabel

Menurut Ismail & Sri (2019) menyatakan bahwa "Definisi Operasional Variabel adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mendeteksi variabel-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian dan untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian". Variabel dependen dan variabel independen adalah dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguraikan definisi diantara kedua variabel penelitian.

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau berkembang menjadi penyebab sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independent. Setiap variabel yang dipengaruhi atau dihasilkan dari adanya variabel yang mempengaruhi disebut sebagai variabel dependen. Variabel dependen dan independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

"Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah" dapat didefinisikan secara operasional sebagai tingkat konsistensi penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam proses pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan. Definisi operasional dari variabel ini dapat mencakup pengukuran kepatuhan pemerintah daerah dalam mengadopsi SAP dalam proses pencatatan transaksi, penggunaan sistem akuntansi yang sesuai, serta penyusunan laporan keuangan yang mencakup semua aspek penting sesuai dengan SAP. Selain itu, variabel ini juga dapat mencakup evaluasi tingkat pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses penerapan SAP (Bastian, 2010).

3.2.3 Sistem Pengendalian Internal (X2)

Sistem Pengendalian Internal dapat didefinisikan secara operasional sebagai rangkaian proses, kebijakan, dan prosedur yang diterapkan oleh suatu organisasi untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien, serta untuk mencegah atau mendeteksi adanya kesalahan atau penyalahgunaan dalam operasi keuangan dan pelaporan. Definisi operasional dari variabel ini dapat mencakup pengukuran efektivitas sistem pengendalian internal melalui evaluasi atas proses pengawasan, pengendalian dan monitoring yang terintegrasi dalam sistem tersebut. Evaluasi tersebut dapat meliputi pengukuran tingkat kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, serta identifikasi dan mitigasi terhadap risiko-risiko yang terkait dengan operasi keuangan dan pelaporan (Raharjo, 2013).

3.2.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Kebenaran, keandalan, relevansi, dan keterbacaan informasi keuangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah disebut sebagai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang sangat baik akan menawarkan informasi yang cukup dan relevan tentang pengelolaan keuangan daerah, memungkinkan pemangku kepentingan untuk menggunakannya untuk menilai kinerja pemerintah daerah dan membuat keputusan keuangan (Erlina dan Rambe, 2018). Akuntabilitas keuangan yang baik juga menunjukkan akuntabilitas, keterbukaan, dan kejujuran pemerintah daerah dalam mengelola dana masyarakat. Oleh karena itu, ketika menilai efektivitas pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan, variabel "kualitas laporan keuangan pemerintah daerah" sangat penting.

Tabel 3. 1 Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Variabel Independen Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	Tingkat kepatuhan penerapan standar akuntansi pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian Laporan Keuangan 2. Realisasi anggaran disajikan 3. Menampilkan laporan arus kas 4. Catatan penyajian laporan keuangan 5. Pengakuan Persediaan 6. Apresiasi Investasi 7. Pengakuan Aset Tetap 8. Perawatan akuntansi untuk konstruksi 9. Penanganan pertanggung jawaban akuntansi 10. Perlakuan Koreksi Kesalahan 11. Penyajian Laporan 	Likert

			Keuangan Konsolidasi 12. Penyajian Laporan Operasional	
2.	Variabel Independen Sistem Pengendalian Internal (X2)	Tingkat efektivitas sistem pengendalian internal	1. Lingkungan Pengendalian 2. Penilaian Resiko 3. Kegiatan Pengendalian 4. Informasi dan Komunikasi 5. Pemantauan Pengendalian Internal	Likert
3.	Variabel Dependen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Tingkat kepatuhan laporan keuangan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi pemerintah.	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat Dibandingkan 4. Dapat Dipahami	Likert

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan yang berada di Jl. Kapten Maulana Lubis No.2, Petisan Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini pada bulan Maret 2023 sampai dengan selesai dan dilakukan pengelolaan data.

Tabel 3. 2 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian																							
		Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■																							
2.	Pengumpulan Data		■																						
3.	Penyusunan Proposal			■	■	■																			
4.	Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■	■											
5.	Seminar Proposal															■									
6.	Penyempurnaan Proposal																■	■							
7.	Penyusunan Skripsi																		■	■	■				
8.	Bimbingan Skripsi																				■	■	■		
9.	Sidang Meja Hijau																							■	

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi Penelitian

Dalam sebuah penelitian, populasi adalah sekelompok orang atau hal-hal yang ada. Populasi, menurut Sugiyono (2016), adalah kategori barang atau orang yang memiliki atribut dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan kesimpulan diambil. Penulis menyimpulkan bahwa populasi penelitian ini terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor BKAD Kota Medan yang berjumlah 113 pegawai.

Tabel 3. 3 Jumlah Pegawai BKAD Kota Medan

NO	Nama Bidang	Jumlah Pegawai
1.	Bidang Bina Daerah Kabupaten/Kota	25
2.	Bidang Akuntansi	15
3.	Bidang Pengamanan	13
4.	Bidang Pengelolaan Anggaran	21
5.	Bidang Kepegawaian	22
6.	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	17
Total		113

Sumber : BKAD Kota Medan

b. Sampel Penelitian

Menurut Ikhsan (2014) sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk dianalisis sehingga hasil analisis dapat digeneralisasikan ke populasi. Selanjutnya menurut (Sugiyono, 2016) sampel adalah Sebagian dari populasi yang dipilih atau diambil untuk dijadikan objek pengamatan atau pengukuran. Pengambilan sampel ini dicapai melalui non-probability sampling, atau sering dikenal dengan sebagai purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik yang menggunakan sampling dengan tujuan tertentu dalam pikiran dan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, atau sering dikenal sebagai sampel penarikan. Sampel berjumlah 53 pegawai berdasarkan populasi dan kriteria sampel dalam pembuatan laporan keuangan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Kriteria yang penulis gunakan atau para pegawai yang terlibat dalam pemilihan sampel di penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pegawai yang bekerja di bidang perbendaharaan dan kas daerah, bidang pengelolaan anggaran, dan bidang akuntansi di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan.
2. Pegawai yang memiliki masa kerja minimal 5 Tahun pada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang bersangkutan, dikarenakan pegawai yang masa kerjanya sudah sampai 5 tahun artinya dapat dikatakan kredibel/professional dalam bidangnya.

Tabel 3. 4 Jumlah Pegawai yang Terlibat dalam Pembuatan Laporan Keuangan BKAD Kota Medan

NO	Nama Bidang	Jumlah Pegawai
1.	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	17
2.	Bidang Pengelolaan Anggaran	21
3.	Bidang Akuntansi	15
Total		53

Sumber : BKAD Kota Medan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui bagaimana penerapan standar akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan BKAD Kota Medan. Kuesioner yang dipakai merupakan kuesioner tertutup yaitu sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal menjawab dengan memilih jawaban yang dikehendaknya (Ikhsan, 2014). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini diadopsi dari peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Safridha (2020), skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert dengan kriteria sebagai berikut :

3.6 Teknik Analisis Data

Proses pemahaman data yang telah diperoleh dari lapangan dan diolah untuk memberikan informasi spesifik dikenal dengan teknik analisis data (Tarigan et al, 2011). Pengelompokan data berdasarkan faktor dan jenis responden, tabulasi data berdasarkan variabel dari semua responden, penyajian data untuk setiap variabel yang diteliti, dan melakukan perhitungan untuk mengevaluasi hipotesis yang diusulkan adalah semua kegiatan dalam analisis data (Sugiyono, 2016). Metode analisis data ini menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, statistik deskriptif, dan uji hipotesis sebagai berikut:

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Tes asumsi klasik mengevaluasi kelayakan model analisis jalur. Jadi, dalam penelitian ini, tes asumsi klasik digunakan untuk menentukan apakah hasil estimasi jalur yang digunakan benar-benar layak atau tidak. Beberapa contoh pengujian asumsi tradisional adalah:

1. Uji Normalitas

Tes normalitas memverifikasi apakah data normal. Imam Ghozali (2016) mengklaim bahwa uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen dan dependen dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Data yang didistribusikan secara normal dan agak mendekati normal adalah model regresi yang baik. Tes Kolmogrov-Smirnov adalah tes normalitas yang digunakan.

Data tersebut dianggap normal, menurut Sugiyono (2016), jika nilai signifikan lebih dari 0,05 pada ($P > 0,05$). Di sisi lain, jika nilai signifikan pada ($P < 0,05$) kurang dari 0,05, data dianggap tidak normal. Profitabilitas

statistik Kolmogorov-Smirnov dapat diperiksa untuk melakukan tes ini. Nilai individu dalam regresi tidak didistribusikan secara normal jika profitabilitas statistik Z kurang dari 0,05.

2. Uji Multikolinearitas

Digunakan untuk memeriksa apakah korelasi substansial antara variabel independen diprediksi oleh model regresi. Multikolinearitas terjadi ketika variabel independen berkorelasi, dan sebaliknya. Dengan memeriksa VIF (Variance Inflation Factor) antara variabel independen dan nilai toleransi, maka dilakukan pengujian multikolinearitas (multicollinearity). Nilai toleransi 0,10 atau sama dengan VIF 10 adalah ambang batas yang umum digunakan untuk menunjukkan multikolinearitas (Ikhsan, 2014).

3. Uji Heteroskedastisitas

Tes ini menentukan apakah varians residual dari satu pengamatan berbeda dari varians residual dari pengamatan lain yang ditetapkan dalam model regresi. Jika demikian, ini dikenal sebagai homokedastisitas; Jika varian tidak setuju, ini dikenal sebagai heteroskedastisitas. Saat membuat keputusan, diasumsikan bahwa heteroskedastisitas akan muncul jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada dalam pola reguler. Heteroskedastisitas tidak ada jika tidak ada pola yang dapat dilihat dan titik-titik (titik) diberi jarak di bawah dan di atas nilai sumbu Y 0. (Ikhsan, 2014). Pengujian gleser juga digunakan dalam penyelidikan ini.

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, maka metode analisis yang digunakan adalah Regresi Linier

Berganda (Multiple Regression). Bentuk umum yang digunakan dengan rumus :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

Y	=	Kualitas Laporan Keuangan
α	=	Konstanta
β	=	Koefisien Regresi
X1	=	Penenerapan Standar Akuntansi Pemerintah
X2	=	Sistem Pengendalian Internal
ϵ	=	Variabel lain yang mempengaruhi Y

3.6.3 Uji Hipotesis

Secara ilmiah menentukan apakah hubungan yang diteror itu benar berdasarkan sampel yang dikumpulkan, pengujian hipotesis adalah proses penelitian. Untuk memastikan apakah hipotesis yang diajukan adalah pernyataan atau dugaan yang salah maka hal tersebut itu perlu ditolak, pengujian hipotesis digunakan.

Rancangan pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H0 : Terdapat pengaruh dan atau hubungan antar variabel yang diuji (X1, X2, Y).

H1 : Tidak terdapat pengaruh dan atau hubungan antar variabel yang diuji (X1, X2, Y).

1. Tahap Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji secara parsial (sendiri) ditunjukkan dari table koefisien dalam hasil output SPSS. Hipotesis penelitian yang akan diuji adalah :

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh pada penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

Ha1 : Terdapat pengaruh pada penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.

Ho2 : Tidak terdapat pengaruh pada sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan

Ha2 : Terdapat pengaruh pada sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya untuk mengetahui signifikan pengaruh atau hubungan antara variabel dilakukan dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

Jika nilai probabilitas $0,05 <$ nilai probabilitas pada table coefficient output SPSS atau $t \text{ tabel} < t \text{ hitung}$, maka Ho1 diterima dan Ha1 ditolak.

Jika nilai probabilitas $0,05 >$ nilai probabilitas pada tabel coefficient output SPSS atau $t \text{ tabel} > t \text{ hitung}$, maka Ho1 ditolak dan Ha1 diterima

2. Tahap Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji simultan (secara keseluruhan) ditunjukkan oleh tabel Annova. Hipotesis yang akan di uji adalah :

Ho3 : Tidak terdapat pengaruh pada penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Ha3 : Terdapat pengaruh pada penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya untuk mengetahui signifikan analisis jalur bandingkan antara nilai probabilitas 0,05 dengan nilai probabilitas signifikan sebagai dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

Jika nilai probabilitas $0,05 <$ nilai probabilitas sig pada tabel Annova output SPSS atau $F \text{ tabel} < F \text{ hitung}$, maka Ho3 diterima dan Ha3 ditolak.

Jika nilai probabilitas $0,05 >$ nilai probabilitas pada tabel Anova output SPSS F tabel $>$ F hitung maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

3.6.4 Uji Validitas

Validitas adalah metrik yang akan menunjukkan berapa banyak validitas yang ada. Juliandi et al (2015) berpendapat bahwa suatu instrumen dianggap valid jika dapat secara akurat mengekspos data dari variabel yang sedang diperiksa dan dapat mengukur hasil yang diinginkan. Menghitung korelasi antara setiap pertanyaan (X) dan skor keseluruhan menghasilkan informasi tentang validitas (Y).

Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu instrumen, yaitu penggunaan rumus korelasi product moment person, dinyatakan valid. Jika nilai r dihitung $>$ tabel r, fondasi untuk pilihan dikatakan valid.

3.6.5 Uji Reabilitas

Alat ukur dengan keandalan tinggi membandingkan hasil pengukuran yang dilakukan berulang kali pada objek yang sama. Jadi, dapat diklaim bahwa instrumen pengukuran data dapat diandalkan jika mereka secara konsisten menghasilkan hasil yang serupa atau tetap ketika digunakan untuk subjek yang sama di beberapa titik waktu.

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan seberapa konsisten hasil pengukuran diperoleh ketika gejala yang sama diukur dua kali atau lebih (Siregar, 2016). Metode perhitungan Croanbach's Alpha akan digunakan untuk pengujian keandalan. Metode Alpha Cronbach dijelaskan oleh Siregar (2016) sebagai koefisien ketergantungan yang menyiratkan interoperabilitas. Jika nilai Alpha Cronbach variabel lebih besar dari 0,60, itu dianggap dapat diandalkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data

Dalam penelitian ini, penulis mengelola data dalam bentuk kuesioner/angket yang terdiri dari 6 pertanyaan untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X1), 6 pertanyaan untuk variabel Sistem Pengendalian Internal (X2), dan 6 pertanyaan untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y). Dimana penyebarannya dilakukan secara personal survey atau penulis mendatangi secara langsung ke Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang ada di Kota Medan. Untuk data angket yang sudah disebar beserta hasil angket yang sudah diperoleh pada Kantor BKAD Kota Medan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1.	Kuesioner yang disebar	53	100%
2.	Kuesioner yang Kembali	53	100%
3.	Kuesioner yang tidak Kembali	0	0%
4.	Kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0%

(Sumber: Hasil Pengelolaan Data Primer, 2023)

Kuesioner yang dikembalikan kepada penulis dan telah diisi oleh responden, selanjutnya akan diteliti kelengkapannya. Dari responden tersebut, kuesioner yang telah disebar adalah sebanyak 53 kuesioner atau 100% dan kuesioner yang kembali sebanyak 53 kuesioner atau 100%, sedangkan kuesioner yang tidak kembali adalah sebanyak 0 kuesioner atau 0%.

4.2.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang ada di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	34	64%
Perempuan	19	36%
Total	53	100%

(Sumber: Hasil Pengelolaan Data Primer,2023)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin di dominasi oleh responden laki-laki yaitu sebanyak 34 orang atau 64% dan untuk responden perempuan sebanyak 19 orang atau 36%.

b. Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel berikut ini yaitu :

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
30-34	7	13%
35-39	11	21%
40-44	10	19%
45-49	15	28%
>50	10	19%
Total	53	100%

(Sumber: Hasil Pengelolaan Data Primer, 2023)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik responden berdasarkan usia dalam penelitian ini yang terdiri dari 53 responden,

sebanyak 7 orang (13%) yang berumur 30-34 tahun, 11 orang (21%) yang berumur 35-39 tahun, 10 orang (19%) yang berumur 40-44 tahun, 15 orang (28%) yang berumur 45-49 tahun, dan 10 orang (19%) berumur di atas 50 tahun keatas.

c. Berdasarkan Masa Kerja

Karakteristik responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini yaitu :

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
9-15	22	42%
15-19	9	17%
20-24	4	8%
25-29	10	19%
>30	8	15%
Total	53	100%

(Sumber: Hasil Pengelolaan Data Primer, 2023)

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa persentase data karakteristik responden berdasarkan masa kerja dalam penelitian ini yang terdiri dari 53 responden, sebanyak 22 orang (42%) telah bekerja selama 9-12 tahun, 9 orang (17%) telah bekerja selama 15-19 tahun, 4 orang (8%) telah bekerja selama 20-24 tahun, 10 orang (19%) telah bekerja selama 25-29 tahun, dan 8 orang (15%) telah bekerja selama 30 tahun keatas.

4.2 Analisis Persentase Jawaban Responden

Persentase jawaban responden yang ada di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

4.2.1 Persentase Responden Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

Tabel 4. 5 Persentase Responden Variabel Standar Akuntansi Pemerintah

Skor Jawaban Responden												
No	STS		TS		N		S		SS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	0	0	0	0	1	2%	39	74%	13	25%	53	100%
2	0	0	0	0	4	8%	30	57%	19	36%	53	100%
3	0	0	0	0	2	4%	41	77%	10	19%	53	100%
4	0	0	0	0	2	4%	36	68%	15	28%	53	100%
5	0	0	0	0	3	6%	29	55%	21	40%	53	100%
6	0	0	0	0	1	2%	38	72%	14	26%	53	100%

(Sumber: Hasil Pengelolaan Data Primer, 2023)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pernyataan 1, mayoritas responden setuju pada pernyataan “Selalu menerapkan basis akrual dan basis kas untuk menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto” sebanyak 39 orang atau 74%.
2. Pernyataan 2, mayoritas responden setuju pada pernyataan “Selalu menyusun dan menyajikan LAK sesuai dengan SAP, dan menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi” sebanyak 30 orang atau 57%.
3. Pernyataan 3, mayoritas responden setuju pada pernyataan “Selalu mengakui dan mencatat persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi” sebanyak 41 orang atau 77%.
4. Pernyataan 4, mayoritas responden setuju pada pernyataan “Selalu mencatat/menilai asset tetap sebesar biaya perolehannya dan mengklasifikasikan asset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya” sebanyak 36 orang atau 68%.

5. Pernyataan 5, mayoritas responden setuju pada pernyataan “Selalu mencatat kewajiban sebesar nilai nominal dan mengakui kewajiban pada saat kewajiban timbul” sebanyak 29 orang atau 55%.
6. Pernyataan 6, mayoritas responden setuju pada pernyataan “Laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah daerah selalu mencakup laporan keuangan dari semua entitas akuntansi” sebanyak 38 orang atau 72%.

4.2.2 Persentase Responden Sistem Pengendalian Internal (X2)

Tabel 4. 6 Persentase Responden Variabel Sistem Pengendalian Internal

Skor Jawaban Responden												
No	STS		TS		N		S		SS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	0	0	0	0	0	0%	41	77%	12	23%	53	100%
2	0	0	0	0	4	8%	30	57%	19	36%	53	100%
3	0	0	0	0	0	0%	44	83%	9	17%	53	100%
4	0	0	0	0	0	0%	41	77%	12	23%	53	100%
5	0	0	0	0	0	0%	19	36%	34	64%	53	100%
6	0	0	0	0	3	6%	37	70%	13	25%	53	100%

(Sumber: Hasil Pengelolaan Data Primer, 2023)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pernyataan 1, mayoritas responden setuju pada pernyataan “BKAD Kota Medan menerapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) secara tertulis” sebanyak 41% atau 77%.
2. Pernyataan 2, mayoritas responden setuju pada pernyataan “BKAD Kota Medan menerapkan batas dan toleransi terhadap penilaian resiko” sebanyak 30 orang atau 57%.
3. Pernyataan 3, mayoritas responden setuju pada pernyataan “BKAD Kota Medan menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko

kegiatan pengendalian” sebanyak 44 orang atau 83%.

4. Pernyataan 4, mayoritas responden setuju pada pernyataan “BKAD Kota Medan menerapkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggung jawab” sebanyak 41 orang atau 77%.
5. Pernyataan 5, mayoritas responden setuju pada pernyataan “BKAD Kota Medan melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit” sebanyak 19 oran atau 36%.
6. Pernyataan 6, mayoritas responden setuju pada pernyataan “Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi” sebanyak 37 orang atau 70%.

4.2.3 Persentase Responden Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Tabel 4. 7 Persentase Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Skor Jawaban Responden												
No	STS		TS		N		S		SS		Jumlah	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	0	0	0	0	1	2%	37	70%	15	28%	53	100%
2	0	0	0	0	1	2%	39	74%	13	25%	53	100%
3	0	0	0	0	0	0%	36	68%	17	32%	53	100%
4	0	0	0	0	1	2%	37	70%	15	28%	53	100%
5	0	0	0	0	0	0%	39	74%	14	26%	53	100%
6	0	0	0	0	3	6%	42	79%	8	15%	53	100%

(Sumber: Hasil Pengelolaan Data Primer, 2023)

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pernyataan 1, mayoritas responden setuju pada pernyataan “Laporan keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai pada SAP dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi” sebanyak 37 orang atau 70%.
2. Pernyataan 2, mayoritas responden setuju pada pernyataan “Informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan telah jujur, benar menggambarkan transaksi dan peristiwa lainnya, dan memenuhi kebutuhan para pengguna” sebanyak 39 orang 74%.

3. Pernyataan 3, mayoritas responden setuju pada pernyataan “Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang di susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya” sebanyak 36 orang atau 68%.
4. Pernyataan 4, mayoritas responden setuju pada pernyataan “Dalam menyusun laporan keuangan menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun” sebanyak 37 orang atau 70%.
5. Pernyataan 5, mayoritas responden setuju pada pernyataan “Laporan keuangan yang dibuat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami” sebanyak 39 orang atau 74%.
6. Pernyataan 6, mayoritas responden setuju pada pernyataan “Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan jelas dan disajikan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna” sebanyak 42 orang atau 79%.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Validitas

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya sebelum akan digunakan sebagai alat pengumpul data. Untuk pengujian validitas kuesioner harus dilakukan dengan membandingkan nilai r_{tabel} (Pearson Correlation) dengan r_{hitung} . Nilai r_{tabel} dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$.

a. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Untuk itu dilakukan uji coba terhadap instrument kepada 53 orang sampel, dengan menggunakan teknik Pearson Correlation dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing item dengan skor totalnya, dan $r = n - k$, $r = 53 - 2 = 51$ (sebesar 0,270). Adapun hasil uji validitas untuk variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Variabel X1

No.	Rhitung	Nilai Rtabel	Status
	Pearson Correlation	N= 51, $\alpha= 5\%$	
1	0,623	0,270	Valid
2	0,588	0,270	Valid
3	0,763	0,270	Valid
4	0,722	0,270	Valid
5	0,528	0,270	Valid
6	0,680	0,270	Valid

(Sumber: Hasil Data Diolah dengan SPSS)

Hasil analisis variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah menunjukkan adanya 6 butir pertanyaan yang diajukan adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan dapat digunakan karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

b. Variabel Sistem Pengendalian Internal

Untuk itu dilakukan uji coba terhadap instrument kepada 53 orang sampel, dengan menggunakan teknik Pearson Correlation dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing item dengan skor totalnya, dan $r = n - k$, $r = 53 - 2 = 51$ (sebesar 0,270). Adapun hasil

uji validitas untuk variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 9 Hasil Uji Validitas Variabel X2

No.	Rhitung	Nilai Rtabel	Status
	Pearson Correlation	N= 51, $\alpha= 5\%$	
1	0,809	0,270	Valid
2	0,649	0,270	Valid
3	0,775	0,270	Valid
4	0,809	0,270	Valid
5	0,454	0,270	Valid
6	0,646	0,270	Valid

(Sumber: Hasil Data Diolah dengan SPSS)

Hasil analisis variabel Sistem Pengendalian Internal menunjukkan adanya 6 butir pertanyaan yang diajukan adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan dapat digunakan karena rhitung > rtabel sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

c. Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Untuk itu dilakukan uji coba terhadap instrument kepada 53 orang sampel, dengan menggunakan teknik Pearson Correlation dengan tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing item dengan skor totalnya, dan $r = n - k$, $r = 53 - 2 = 51$ (sebesar 0,270). Adapun hasil uji validitas untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 10 Hasil Uji Validitas Variabel Y

No.	Rhitung	Nilai Rtabel	Status
	Pearson Correlation	N= 51, $\alpha= 5\%$	
1	0,723	0,270	Valid
2	0,740	0,270	Valid
3	0,684	0,270	Valid
4	0,669	0,270	Valid
5	0,663	0,270	Valid
6	0,540	0,270	Valid

(Sumber: Hasil Data Diolah dengan SPSS)

Hasil analisis variabel Sistem Pengendalian Internal menunjukkan adanya 6 butir pertanyaan yang diajukan adalah valid. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa butir pertanyaan dapat digunakan karena rhitung > rtabel sehingga dapat dikatakan memenuhi syarat validitas.

4.3.2 Uji Realibilitas

a. Uji Realibilitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Dari hasil uji realibilitas yang dilakukan pada variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X1) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 11 Hasil Uji Reabilitas X1

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.712	6

(Sumber: Hasil Data Diolah dengan SPSS)

Dari tabel di atas diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,712 yang dimana lebih besar dari nilai > 0,60. Maka bisa disimpulkan kalau item dari variabel penerapan standar akuntansi pemerintah (X1) reliabel.

b. Uji Realibilitas Sistem Pengendalian Internal

Dari hasil uji realibilitas yang dilakukan pada variabel sistem pengendalian internal (X2) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 12 Hasil Uji Reabilitas X2

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.756	6

(Sumber: Hasil Data Diolah dengan SPSS)

Dari tabel di atas diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,756 yang dimana lebih besar dari nilai $> 0,60$. Maka bisa disimpulkan kalau item dari variabel sistem pengendalian internal (X2) reliabel.

c. Uji Realibilitas Kualitas Laporan Keuangan

Dari hasil uji realibilitas yang dilakukan pada variabel kualitas laporan keuangan (Y) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 13 Hasil Uji Reabilitas Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.757	6

(Sumber: Hasil Data Diolah dengan SPSS)

Dari tabel di atas diperoleh nilai Cronbach Alpha sebesar 0,757 yang dimana lebih besar dari nilai $> 0,60$. Maka bisa disimpulkan kalau item dari variabel kualitas laporan keuangan (Y) reliabel.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendapatkan best linier unbiased estimator, yaitu nilai estimasi yang terbaik, linier dan tidak bersifat bias. Adapun uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Salah satu syarat model regresi yang baik adalah data yang akan diuji terdistribusi secara normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), dengan ketentuan data dapat dikatakan terdistribusi normal jika nilai data pada nilai Asymp. Sig (2-tailed) $> 0,05$. Berikut ini adalah hasil dari uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji statistic non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Tabel 4. 14 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.21916488
	Absolute	.096
Most Extreme Differences ^S	Positive	.096
	Negative	-.059
Kolmogorov-Smirnov Z		.701
Asymp. Sig. (2-tailed)		.709

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

(Sumber: Hasil Data Diolah dengan SPSS)

Dapat dilihat dari tabel di atas, hasil uji K-S diketahui bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar $0,709 > 0,05$, jadi bisa disimpulkan kalau data tersebut terdistribusi normal.

b. Uji Multikoleniaritas

Uji Multikoleniaritas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi atau tidak pada variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksinya maka dapat dilakukan uji multikoleniaritas dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) dengan ketentuan apabila nilai Tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 maka model regresi terbebas dari gejala multikoleniaritas. Hasil uji multikoleniaritas disajikan pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel 4. 15 Hasil Uji Multikoleniaritas

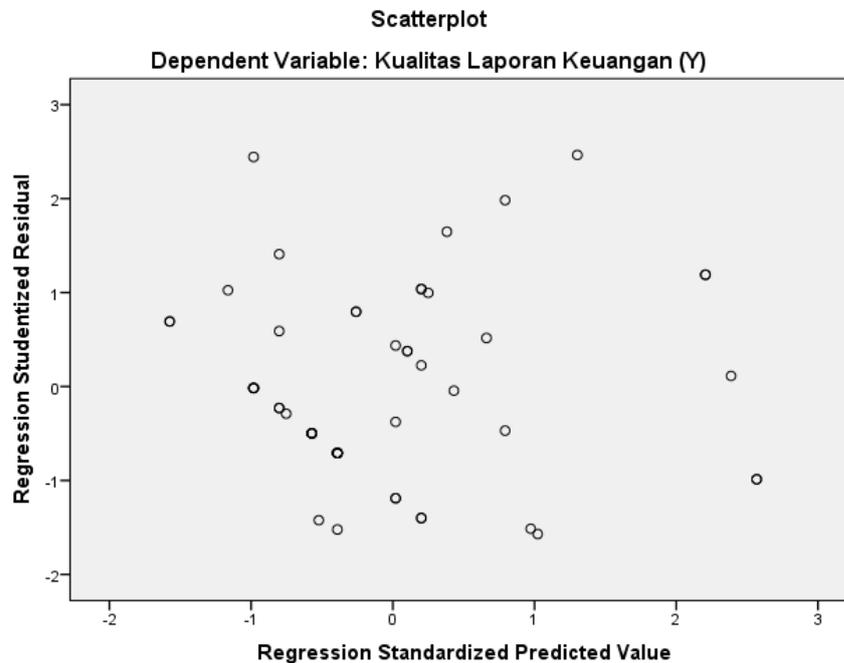
Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	.815	1.227
Sistem Pengendalian Internal (X2)	.815	1.227

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)
(Sumber: Hasil Data Diolah dengan SPSS)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada data penelitian yang digunakan tidak terdapat gejala multikoleniaritas. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai tolerance keseluruhan variabel independen yaitu lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10.

c. Uji Heterokedastitsitas

Gambar 4. 1 Hasil Uji Heterokedastisitas



(Sumber: Hasil Data Diolah dengan SPSS)

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID pada sumbu Y dan ZPRED pada sumbu X. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas dikarenakan titik-titik pada scatter plot tidak membentuk pola yang begitu jelas, serta titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

4.3.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua variabel independen yaitu Penerapan Standar Akuntansi (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2) terhadap satu variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan (Y). Berikut hasil pengujian data dengan menggunakan regresi linear berganda :

Tabel 4. 16 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.580	1.604		2.232	.030
Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	.260	.057	.322	4.534	.000
Sistem Pengendalian Internal (X2)	.591	.060	.704	9.925	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

(Sumber: Hasil Data Diolah dengan SPSS)

Hasil uji regresi linier berganda pada Tabel 4.10 membentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 3,580 + 0,260X_1 + 0,591X_2 + e$$

Persamaan regresi di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (Constant) bernilai 3,580. Artinya apabila skor variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal bernilai 0 maka Kualitas Laporan Keuangan naik sebesar 3,580.
- Nilai koefisien regresi variabel Standar Akuntansi Pemerintah sebesar 0,260 bermakna apabila variabel Standar Akuntansi Pemerintah ditingkatkan 1 dalam satuan maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar

0,260 dalam satuan atau sebesar 26%.

- c. Nilai koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,591 bermakna apabila variabel Sistem Pengendalian Internal ditingkatkan 1 dalam satuan maka akan meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan sebesar 0,591 dalam satuan atau sebesar 59%.

4.3.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang menyatakan bahwa diduga Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

a. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui secara parsial apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Uji parsial menggunakan taraf signifikansi 5% atau 0,05 dimana variabel independen dianggap berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi (Sig.) kurang dari 5% atau 0,05.

Tabel 4. 17 Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
	(Constant)	3.580	1.604		2.232	.030
1	Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	.260	.057	.322	4.534	.000
	Sistem Pengendalian Internal (X2)	.591	.060	.704	9.925	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

(Sumber: Hasil Data Diolah dengan SPSS)

Dari tabel di atas, maka kesimpulan hasil Uji-t adalah sebagai berikut:

a) Variabel Standar Akuntansi Pemerintah

Dapat dilihat pada tabel di atas memiliki nilai Sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung = $4,534 > t$ tabel = $1,674$ Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh secara positif signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan, sehingga dapat membuktikan kalau H_1 diterima dan H_0 ditolak.

b) Variabel Sistem Pengendalian Internal

Dapat dilihat pada tabel di atas memiliki nilai Sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung = $9,925 > t$ tabel = $1,674$ Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara positif signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan, sehingga dapat membuktikan kalau H_2 diterima dan H_0 ditolak.

b. Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan, bisa dilihat dibawah ini.

Tabel 4. 18 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	107.728	2	53.864	96.792	.000 ^b
	Residual	27.825	50	.556		
	Total	135.553	52			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal (X2), Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

(Sumber: Hasil Data Diolah dengan SPSS)

Dari uji ANOVA atau F test, diperoleh Fhitung sebesar 96,792 dengan tingkat signifikansi 0,000, karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dan Fhitung (96,792) lebih besar dari Ftabel (2,78), maka mode regresi dapat digunakan untuk memprediksi Kualitas Laporan Keuangan atau bisa juga dikatakan kalau Penerapan Standar Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan sehingga dapat membuktikan kalau H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak.

4.3.6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien R square digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Apabila R^2 mendekati 1 artinya variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen dan memberikan pengaruh yang kuat terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 19 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.891 ^a	.795	.787	.746

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal (X2), Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

(Sumber: Hasil Data Diolah dengan SPSS)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Adjust R Square sebesar 0,787 atau 78,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan sebesar 78,7% oleh variabel independen dalam penelitian ini yaitu Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pemerintah. Sedangkan sisanya sebesar

0,213 atau 21,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

a. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, hasil penelitian standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan memperoleh nilai Sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung = $4,534 > t$ tabel = $1,674$. Dari hasil tersebut dinyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dari hasil penelitian di atas juga menunjukkan kalau H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak. Dapat dikatakan kalau penerapan standar akuntansi pemerintah di Kantor BKAD Kota Medan sudah menerapkan standar akuntansi pemerintah dengan baik dalam membuat laporan keuangannya.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah memahami PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Penyusunan pedoman akuntansi sangat diperlukan karena mengingat adanya batas waktu bagi organisasi publik untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban yang berisi laporan keuangan semakin mendesak. Sehingga semakin menerapkan dan memahami standar akuntansi pemerintah maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk

(2018) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut juga didukung dengan penelitian oleh Yunita (2015), Kuntadi, dkk (2022), Wulandari, dkk (2020), Juwita (2013) yang juga menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Walaupun beberapa penelitian menyebutkan kalau standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, namun ada beberapa penelitian yang menyebutkan kalau standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, contohnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Artana (2019) dan Mahartini (2021) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, hasil penelitian sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan memperoleh nilai Sig. $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $= 9,925 > t$ tabel $= 1,674$. Dari hasil tersebut dinyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dari hasil penelitian di atas juga menunjukkan kalau H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak. Dapat dikatakan kalau sistem pengendalian internal di Kantor BKAD Kota Medan sudah baik dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas.

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan melakukan pengawasan Internal yaitu seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sehingga semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut juga didukung dengan penelitian oleh Saputra (2015), Faishol (2016), Erlina (2020), Triono (2020) yang juga menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Walaupun beberapa penelitian menyebutkan kalau sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, namun ada beberapa penelitian yang menyebutkan kalau sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, contohnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Syukria (2018), Siwambudi, dkk (2017), Hasanah (2020), Purnomo (2014), Santoso (2016) yang dimana mereka menyatakan bahwa Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

c. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan, terdapat pengaruh

bersama-sama (simultan) variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji F yang diperoleh F_{hitung} sebesar 96,792 lebih besar dari F_{tabel} yaitu 2,78 dengan signifikan $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan kalau penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada BKAD Kota Medan. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan di atas membuktikan kalau H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak. Dapat dikatakan juga kalau Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1) dan Sistem Pengendalian Internal (X2) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y), jadi bisa diambil kesimpulan kalau BKAD Kota Medan sudah sangat baik dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di Kota Medan dengan menggunakan SPSS sebagai alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. H_{a1} ini dapat diketahui melalui hasil uji t yang sudah dilakukan dimana membuktikan bahwa H_{a1} diterima dan H_{01} ditolak. Jadi dapat dikatakan kalau penerapan standar akuntansi pemerintah sudah diterapkan dan memahami standar akuntansi pemerintah dalam membuat laporan keuangan.
- b. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dapat diketahui melalui hasil uji t yang sudah dilakukan dimana membuktikan bahwa H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak. Jadi dapat dikatakan kalau sistem pengendalian internal sudah dijalankan dengan baik dalam membuat laporan keuangan yang berkualitas.
- c. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hal ini dapat diketahui melalui hasil uji F yang sudah dilakukan dimana membuktikan

bahwa H_{a3} diterima dan H_0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan kalau penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal sudah baik dalam membuat sebuah laporan keuangan pemerintahan yang berkualitas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka peneliti ingin memberi saran sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini menunjukkan kalau penerapan standar akuntansi dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga diharapkan agar terus meningkatkan dan mempertahankan kualitas laporan keuangan yang dibuat dengan melakukan pelatihan teknis, lebih mematuhi dan lebih memahami standar akuntansi pemerintah, dan melakukan pelaksanaan sistem pengendalian internal agar lebih baik dan lebih serius sebelum laporan keuangan masuk ke masa audit agar kualitas laporan keuangan meningkat.
- b. Bagi Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan diharapkan agar dapat memberikan kinerja yang lebih baik lagi bagi masyarakat dengan memberikan laporan keuangan yang baik di mata masyarakat.
- c. Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan menambah variabel yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, serta mampu untuk meneliti pada lokasi penelitian yang berbeda, sehingga dapat memberikan pandangan yang lebih baik dan dapat diimplementasikan secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiko, R. G., Astuty, W., & Hafsa, H. (2019). Pengaruh Pengendalian Intern, Etika Auditor, Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pt. Inalum. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (Jakk)*, 2(1), 52-68.
- Agustiwan, N. T., & Rasmini, N. K. (2016). Pengaruh Sistem Berbasis Akrua, TI, dan SPIP pada Kualitas Laporan Keuangan dengan Kompetensi SDM sebagai Moderasi. *E-journal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Artana, A. S. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Elsye, R., et al. (2016). *Dasar-Dasar Akuntansi Akrua Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Erlina, et al. (2018). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Jakarta: Salemba Empat
- Faishol, A. (2016). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap Kualitas laporan keuangan (studi kasus pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 1(3), 8-Halaman.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, P. T. (2015). pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi empiris bpkad kabupaten kubu raya tahun 2015). *MAKSI UNTAN*, 4(4).
- Hanum, Z., Hafsa, H., & Ritonga, P. (2021, August). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Kampus Islam Swasta di Kota

Medan. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 814-819).

Harahap, I., et al. (2017). *Hadis-hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Hasanah, S., & Siregar, T. R. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di Kabupaten Labuhanbatu. *JAKPI-Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia*, 9(1), 39-47.

Ikhsan, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Bandung: Citapustaka Media

Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 131-140.

Januri, J. (2021, August). Peranan Sistem Pengendalian Intern, Dalam Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Persediaan. In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial dan Humaniora (Vol. 1, No. 1, pp. 78-84).

Juwita, R. (2013). Pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. *Trikonomika*, 12(2), 201-214.

Kiranayanti, I. A. E. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Basis Akruial Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(2).

Kuntadi, C., Saragi, J. E. M., & Syafira, S. I. (2022). Pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 3(5), 458-468.

Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *KRISNA*:

Kumpulan Riset Akuntansi, 11(2), 170-178.

- Lubis, P. S. (2018). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem Pengendalian internal terhadap kualitas laporan Keuangan pada pd. Pasar kota medan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Mahartini, N. K. A., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(4), 1125-1134.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurillah, A.S. dan Muid, D. (2014). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah: Studi empiris pada SKPD Kota Depok). *Dipenogoro Journal of Accounting*, 3(2).
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara. (2011). Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Pujanira, P. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. *Jurnal Nominal*, 6(2).
- Purnomo, B. S. (2014). Pengaruh sistem pengendalian internal dan kekuatan

- koersif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 276-288.
- Rahmawati, A., Mustika, I. W., & Eka, L. H. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 20(2).
- Safridha, M. A. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus BPKAD Provinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Santoso, E. B. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur)
- Saputra, A., & Satriawan, R. A. (2015). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 2(2), 1-15.
- Sari, E. N., & Saragih, F. (2009). Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Hotel Berbintang Di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*.
- Saragih, F., SE, M.Si. (2014). Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD SE Kota Medan. Tesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Siregar, H. S. (2017). Analisis Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 8.
- Siregar, S. (2016). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sri Wahyuni, N. (2019). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara)* (Doctoral Dissertation).
- Syukria, P. L. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PD. Pasar Kota Medan*. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara (UINSU).
- Tarigan, M., Roux, J., Van Wyk, M., Tjahjono, B., & Wingfield, M. J. (2011). A new wilt and die-back disease of *Acacia mangium* associated with *Ceratocystis manginecans* and *C. acaciivora* sp. nov. in Indonesia. *South African Journal of Botany*, 77(2), 292-304.
- Teguh, M. (2014). *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Triono, B. S., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 213-220.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Ketenagakerjaan.
- Wulandari, D. R., & Octaviani, A. (2020). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *AKTUAL*, 5(1).
- Yunita, T. A., Tanjung, A. R., & Anggraini, L. (2015). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD Kota Dumai)* [Doctoral dissertation, Riau University].
- Laporan Kinerja BKAD Kota Medan. Diakses pada 13 Mei 2023, <http://bpkad.pemkomedan.go.id/kategori/detail/laporan-keuangan>

Catatan Berita Mei 2018 – BPK: Opini WTP Bukan Jaminan Tak Ada Kecurangan. Diakses pada 25 Februari 2023, <http://www.medan.bpk.go.id>.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Tahun 2006-2023. Diakses pada 03 Maret 2023, <http://www.bpk.go.id>.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018. Diakses pada 25 Februari 2023, <http://www.medan.bpk.go.id>.

Pemprov Sumut Raih Opini WTP 8 Kali Berturut-turut. Diakses pada 13 April 2023, <https://www.detik.com>.

LAMPIRAN

Kuesioner Penelitian

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA BKAD KOTA MEDAN)

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Cara pengisian kuesioner adalah:
 - a. Semua pernyataan dijawab dengan cara memberikan tanda (√) pada salah satu jawaban yang tersedia dan paling tepat menurut persepsi Bapak/Ibu
 - b. Tidak ada benar atau salah dalam memberikan jawaban karena kami hanya memperhatikan pada suatu angka atau jawaban yang menunjukkan persepsi terbaik dari Bapak/Ibu
2. Terdapat beberapa pilihan pernyataan, yaitu: STS : Sangat Tidak Setuju
 - TS : Tidak Setuju
 - N : Netral
 - S : Setuju
 - SS : Sangat Setuju

B. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Usia :
4. Masa Kerja :

Daftar Pernyataan tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Saya selalu menerapkan basis akrual dan basis kas untuk mengakui transaksi/peristiwa yang terjadi serta selalu menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran menggunakan akuntansi berbasis akrual dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto.					
2.	Saya selalu menyusun dan menyajikan LAK sesuai dengan SAP, dan menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi serta selalu menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.					
3.	Saya selalu mengakui dan mencatat persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi serta selalu mengakui kas yang telah dikeluarkan sebagai investasi setelah manfaat ekonomi potensi di masa yang akan datang dapat diperoleh dan nilai perolehan investasi dapat diukur.					
4.	Saya selalu mencatat/menilai aset tetap sebesar biaya perolehannya dan mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas serta selalu mengungkapkan informasi konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi dan memindahkan konstruksi dalam pengerjaan ke aset tetap yang bersangkutan.					
5.	Saya selalu mencatat kewajiban sebesar nilai nominal dan mengakui kewajiban pada saat kewajiban timbul serta selalu mengoreksi kesalahan melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan berdasarkan SAP.					
6.	Laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan selalu mencakup laporan keuangan dari semua entitas akuntansi serta dalam laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola pemerintah daerah					

Daftar Pernyataan tentang Sistem Pengendalian Internal (X₂)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	BKAD Kota Medan telah menerapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) secara tertulis					
2.	BKAD Kota Medan telah menerapkan penentuan batas dan penentuan toleransi terhadap penilaian resiko					
3.	BKAD Kota Medan telah menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko kegiatan pengendalian					
4.	BKAD Kota Medan telah menerapkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggungjawab					
5.	BKAD Kota Medan telah melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit					
6.	Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi					

Daftar Pernyataan Tentang Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1.	Laporan keuangan yang saya susun tepat waktu, sesuai pada SAP dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan saat ini dan masa yang akan datang serta mengkoreksi keputusan masa lalu.					
2.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jujur, benar menggambarkan transaksi dan peristiwa lainnya, dan memenuhi kebutuhan para pengguna serta tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya dan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material					
3.	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
4.	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.					
5.	Laporan keuangan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami.					
6.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					

Lampiran 1. Hasil Jawaban Kuesioner Variabel Standar Akuntansi Pemerintah

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Total X1
5	5	5	5	4	4	28
4	4	4	3	4	4	23
4	4	4	4	5	4	25
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	5	5	4	5	5	28
5	4	4	4	4	4	25
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	3	23
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	4	5	29
5	4	5	5	4	5	28
5	5	5	5	5	5	30
3	4	5	5	4	5	26
4	5	4	5	5	5	28
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	4	4	5	5	4	27
4	3	4	4	4	4	23
4	4	3	5	5	4	25
4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	4	5	4	26
4	5	4	4	4	4	25
4	5	4	4	4	4	25
5	3	4	5	5	4	26
4	5	4	4	4	4	25
4	5	4	4	4	4	25
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	5	4	25
4	5	4	4	4	5	26
4	4	4	4	5	4	25
4	4	4	4	4	5	25
4	4	4	4	5	4	25
4	4	4	4	4	5	25
5	4	4	5	5	4	27
4	5	4	4	3	4	24
4	4	4	4	4	4	24

4	5	4	4	5	5	27
4	4	4	4	4	4	24
4	4	3	4	3	4	22
4	4	4	4	5	4	25
5	5	5	5	4	4	28
4	4	4	3	4	4	23
4	4	4	4	5	4	25
4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	4	4	4	25
4	5	4	4	5	4	26
5	3	4	5	3	4	24
4	4	4	4	5	5	26
4	4	4	4	4	4	24
4	3	4	4	4	4	23
4	4	4	4	5	4	25

Lampiran 2. Hasil Jawaban Kuesioner Variabel Sistem Pengendalian Internal

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Total X2
4	3	4	4	5	4	24
4	4	4	4	4	3	23
4	4	4	4	5	4	25
4	4	4	4	5	4	25
4	5	4	5	4	5	27
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	5	5	30
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	3	28
5	4	5	4	5	4	27
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	4	4	5	4	5	27
4	5	4	4	4	4	25
4	4	4	4	4	4	24

4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	4	5	4	26
4	4	4	4	5	4	25
4	5	4	4	5	4	26
5	4	4	5	4	4	26
4	4	4	4	5	4	25
4	5	4	4	5	4	26
4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	4	4	4	25
4	4	4	4	5	5	26
4	3	4	4	5	4	24
4	4	4	4	5	5	26
4	5	4	4	5	4	26
4	5	4	4	5	5	27
5	4	4	5	5	4	27
4	5	4	4	4	4	25
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	5	5	26
4	4	4	4	5	4	25
4	5	5	4	4	4	26
4	4	4	4	5	4	25
4	3	4	4	5	4	24
4	4	4	4	4	3	23
4	4	4	4	5	4	25
4	4	4	4	5	4	25
4	4	4	4	5	4	25
4	5	4	4	5	4	26
5	5	4	5	5	4	28
4	4	4	4	5	5	26
4	4	4	4	5	4	25
4	4	4	4	4	4	24
4	3	4	4	5	4	24

Lampiran 3. Hasil Jawaban Kuesioner Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Total Y
5	4	4	4	5	4	26
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	4	4	4	5	27
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	5	5	30
5	4	5	4	4	4	26
4	4	4	4	5	5	26
5	5	5	5	5	5	30
5	5	5	5	4	4	28
5	5	5	5	5	4	29
5	5	5	5	5	5	30
5	4	4	4	5	4	26
3	3	5	5	4	5	25
4	4	5	5	4	3	25
4	4	4	4	4	4	24
5	5	5	5	4	4	28
5	5	5	5	5	4	29
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	4	4	3	24
5	4	5	5	4	4	27
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	5	4	5	27
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
5	5	4	4	5	4	27
4	4	4	4	4	4	24
4	5	4	4	5	4	26
4	4	5	4	4	4	25
4	5	4	4	5	4	26
4	4	5	5	4	4	26
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24

4	5	5	4	5	5	28
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	3	4	4	23
4	4	4	4	4	4	24
5	4	4	4	5	4	26
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	3	23
4	4	4	4	4	4	24
5	4	5	5	4	4	27
4	5	4	4	5	4	26
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	5	4	4	25
4	4	4	5	4	4	25

Lampiran 4. Hasil SPSS

Uji Validitas X1

		Correlations						Standar Akuntansi Pemerintah (X1)
		X11	X12	X13	X14	X15	X16	
X11	Pearson Correlation	1	.110	.470**	.645**	.135	.178	.623**
	Sig. (2-tailed)		.432	.000	.000	.333	.202	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X12	Pearson Correlation	.110	1	.403**	.144	.159	.357**	.588**
	Sig. (2-tailed)	.432		.003	.303	.257	.009	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X13	Pearson Correlation	.470**	.403**	1	.495**	.164	.535**	.763**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003		.000	.240	.000	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X14	Pearson Correlation	.645**	.144	.495**	1	.228	.377**	.722**
	Sig. (2-tailed)	.000	.303	.000		.100	.005	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X15	Pearson Correlation	.135	.159	.164	.228	1	.247	.528**
	Sig. (2-tailed)	.333	.257	.240	.100		.075	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X16	Pearson Correlation	.178	.357**	.535**	.377**	.247	1	.680**
	Sig. (2-tailed)	.202	.009	.000	.005	.075		.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	Pearson Correlation	.623**	.588**	.763**	.722**	.528**	.680**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	53	53	53	53	53	53	53

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas X2

Correlations

		X21	X22	X23	X24	X25	X26	Sistem Pengendalian Internal (X2)
X21	Pearson Correlation	1	.349*	.716**	.892**	.216	.326*	.809**
	Sig. (2-tailed)		.010	.000	.000	.120	.017	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X22	Pearson Correlation	.349*	1	.461**	.425**	.025	.256	.649**
	Sig. (2-tailed)	.010		.001	.002	.859	.064	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X23	Pearson Correlation	.716**	.461**	1	.596**	.233	.322*	.775**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.000	.093	.019	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X24	Pearson Correlation	.892**	.425**	.596**	1	.122	.414**	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000		.383	.002	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
X25	Pearson Correlation	.216	.025	.233	.122	1	.273*	.454**
	Sig. (2-tailed)	.120	.859	.093	.383		.048	.001
	N	53	53	53	53	53	53	53
X26	Pearson Correlation	.326*	.256	.322*	.414**	.273*	1	.646**
	Sig. (2-tailed)	.017	.064	.019	.002	.048		.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
Sistem Pengendalian Internal (X2)	Pearson Correlation	.809**	.649**	.775**	.809**	.454**	.646**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.001	.000	
	N	53	53	53	53	53	53	53

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Y

		Correlations						Kualitas Laporan Keuangan (Y)
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
Y1	Pearson Correlation	1	.580**	.378**	.350*	.471**	.148	.732**
	Sig. (2-tailed)		.000	.005	.010	.000	.292	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
Y2	Pearson Correlation	.580**	1	.276*	.240	.634**	.263	.740**
	Sig. (2-tailed)	.000		.045	.083	.000	.057	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
Y3	Pearson Correlation	.378**	.276*	1	.714**	.138	.217	.684**
	Sig. (2-tailed)	.005	.045		.000	.323	.118	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
Y4	Pearson Correlation	.350*	.240	.714**	1	.116	.235	.669**
	Sig. (2-tailed)	.010	.083	.000		.410	.090	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
Y5	Pearson Correlation	.471**	.634**	.138	.116	1	.353**	.663**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.323	.410		.009	.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
Y6	Pearson Correlation	.148	.263	.217	.235	.353**	1	.540**
	Sig. (2-tailed)	.292	.057	.118	.090	.009		.000
	N	53	53	53	53	53	53	53
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Pearson Correlation	.732**	.740**	.684**	.669**	.663**	.540**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	53	53	53	53	53	53	53

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reabilitas X1**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.712	6

Uji Reabilitas X2**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.756	6

Uji Reabilitas Y**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.757	6

Uji Normalitas**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		53
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.21916488
	Absolute	.096
Most Extreme Differences	Positive	.096
	Negative	-.059
Kolmogorov-Smirnov Z		.701
Asymp. Sig. (2-tailed)		.709

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji Multikolinieritas

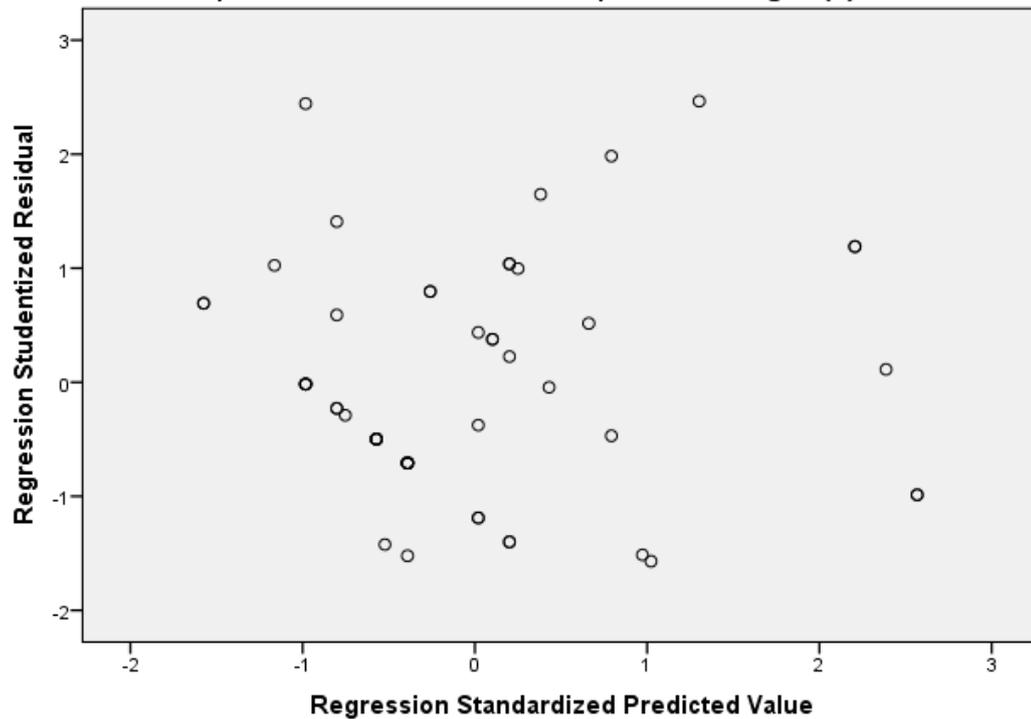
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.580	1.604		2.232	.030		
Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	.260	.057	.322	4.534	.000	.815	1.227
Sistem Pengendalian Internal (X2)	.591	.060	.704	9.925	.000	.815	1.227

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Scatterplot

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)



Uji T

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.580	1.604	2.232	.030
	Standar Akuntansi Pemerintah (X1)	.260	.057	.322	.000
	Sistem Pengendalian Internal (X2)	.591	.060	.704	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	107.728	2	53.864	96.792	.000 ^b
	Residual	27.825	50	.556		
	Total	135.553	52			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal (X2), Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

Uji Koefisien Determinasi (R)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.891 ^a	.795	.787	.746

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal (X2), Standar Akuntansi Pemerintah (X1)

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/01/2023

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 14/01/2023

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Hafizh Assariy Madjid
NPM : 1905170097
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

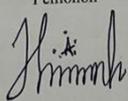
Identifikasi Masalah : masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi sistem informasi dan sistem akuntansi sektor publik dalam penatausahaan keuangan dalam mencapai good governance

Rencana Judul : 1. ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
2. ANALISIS SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DALAM MENCAPAI GOOD GOVERNANCE
3. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mewujudkan Good Governance

Objek/Lokasi Penelitian : Instansi Pemerintahan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon


(Hafizh Assariy Madjid)

Permohonan ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.
1 dari 2 halaman

Halaman ke

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

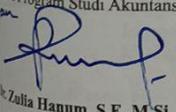
PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/14/01/2023

Nama Mahasiswa : Hafizh Assariy Madjid
 NIM : 1905170097
 Program Studi : Akuntansi
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
 Tanggal Pengajuan Judul : 14/01/2023
 Nama Dosen Pembimbing : M. Shareza Hafiz, SE., M.Acc (04 Februari 2023)

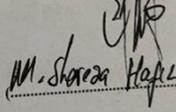
Judul Disetujui**)

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Perorok
 Dan Sistem Pengendalian Internal terhadap
 Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada
 BPKAD kota Medan)

Disetujui oleh:
 Ketua Program Studi Akuntansi

 Zahia Hanum, S.E., M.Si.)

Medan, 22 Februari 2023

Dosen Pembimbing


 M. Shareza Hafiz, M.Acc.

Halaman ke

Halaman ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

Nomor : 1098/IL.3-AU/UMSU-05/E/2023
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 24 Syawal 1444 H
 15 Mei 2023 M

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan
 Jln. Jendral Besar A.H Nasution No.32 Medan
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Hafizh Assariy Madjid
 Npm : 1905170097
 Program Studi : Akuntansi
 Semester : VIII (Delapan)
 Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BKAD Kota Medan)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


 Dekan
Dr. H. Jantri, SE, MM, M.Si
 NIDN : 0109086502



Tembusan :
 1. Peringgal








PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
 Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143
 Telp. (061) 7873439 Fax. (061) 7873314
 E-mail : brida@pemkomedan.go.id Website : www.brida.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN PRA RISET
 Nomor : 000.9/0701

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 57 Tahun 2001 Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 97 Tahun 2022 Tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan dan setelah membaca/memperhatikan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 1426/II.3-AU/UMSU-05/F/2023 Tanggal 09 Juni 2023 Perihal Izin Riset Pendahuluan.

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan dengan ini memberikan Surat Permohonan Izin Pra Riset Tugas Akhir kepada :

Nama	: Hafizh Assariy Madjid	
NIM	: 1905170097	
Jurusan	: Akuntansi	
Lokasi	: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan	
Judul	: "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Keuangan (Studi pada BKAD Kota Medan)"	Pemerintah dan Kualitas Laporan
Lamanya	: 3 (Tiga) Bulan	
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Pra Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Pra Riset.
3. Tidak dibenarkan melakukan Pra Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. Hasil Pra Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Pra Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@pemkomedan.go.id).
5. Surat keterangan Pra Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat keterangan Pra Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n
 Pada Tanggal : 23 Mei 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
 KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
 KOTA MEDAN,

 MANSURSYAH, S, Sos, M. AP
 Pembina Tk. I (V/b)
 NIP 196805091989091001

Tembusan :

1. Wali Kota Medan (sebagai Laporan).
2. Kepala Badan Keuangan dan aset Daerah kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Arsip.

: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, integritasnya terjamin. Untuk informasi lebih lanjut hubungi nomor kontak yang tertera pada formulir ini.
 - 191 787 3439 - 11 Tahun sejak Pada 5 April 1999
 000

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 1429/TGS/II.3-AU/UMSU-05/F/2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan
Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 22 Februari 2023

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Hafizh Assariy Madjid
N P M : 1905170097
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BKAD Kota Medan)

Dosen Pembimbing : Mhd. Shareza Hafiz, SE., M.Acc

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **09 Juni 2024**
4. Revisi Judul

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 20 Dzulqaidah 1444 H
09 Juni 2023 M

Dekan
Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si
NIDN : 0109086502



Tembusan :
1. Pertinggal

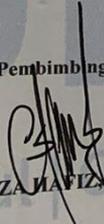

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

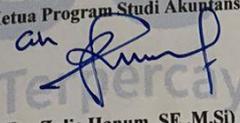
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : HAFIZH ASSARIY MADJID
 N.P.M : 1905170097
 Dosen Pembimbing : M. SHAREZA HAFIZ, SE., M.Acc
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
 Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA BKAD KOTA MEDAN)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- latar belakang perbaiki - masalahnya ditulis dengan baik - dibuat lebih terstruktur.	20/02	☑
Bab 2	- tambah referensi - tambah indikator - gambar kerangka konseptual	28/02	☑
Bab 3	- Jenis Penelitian - Analisis data - Definisi operasional - populasi - sample	30/03	☑
Daftar Pustaka	- perbaiki tulisannya - Huruf Perbaikan besar & kecil - Mendeleey - papikan!	30/03	☑
Persetujuan Seminar Proposal	ACE Seminar Proposal 	16/05	☑

Dosen Pembimbing Skripsi

 (M. SHAREZA HAFIZ, SE., M.Acc)

Medan, 16 Mei 2023
 Diketahui / Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

 (Dr. Zulia Hanum., SE., M.Si)


MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 22 Juni 2023* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi dengan agenda sebagai berikut :

Nama : *Hafizh Assariy Malfid*
 No. Matrik : *1905170097*
 Tempat / Tgl. Lahir : *Medan, 04 Juni 2002*
 Alamat Rumah : *Jln. Marelan VII*
 Judul Proposal : *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BKAD Kota Medan)*

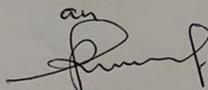
Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
I	<i>Perbaiki latar belakang masalah dan batasan masalah</i>
II	<i>Perbaiki cara pengutipan teori, tambah teori</i>
III	<i>Perbaiki definisi operasional.</i>
Daftar Pustaka	<i>Tambah daftar pustaka</i>
Keputusan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, 22 Juni 2023

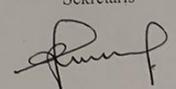
TIM SEMINAR

Ketua



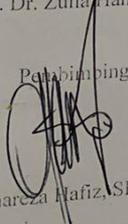
Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris



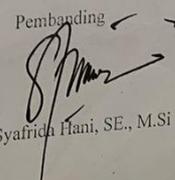
Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing



Mhd. Shareza Hafiz, SE., M.Acc

Pembanding



Dr. Hj. Syafrida Hani, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Menyatakan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 22 Juni 2023 menerangkan bahwa:

Nama : Hafizh Assariy Madjid
NPM : 1905170097
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 04 Juni 2002
Alamat Rumah : Jln. Marelan VII
Judul Proposal : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BKAD Kota Medan)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : *Mhd. Shareza Hafiz, SE., M.Acc*

Medan, 22 Juni 2023

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulha Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Mhd. Shareza Hafiz, SE., M.Acc

Pembanding

Dr. Hj. Syafida Hani, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si
NIDN : 0105087601

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 2184/II.3-AU/UMSU-05/F/2023
Lamp. : -
Hal : Menyelesaikan Riset

Medan, 29 Muharam 1445 H
16 Agustus 2023 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan
Jln. Kapten Maulana Lubis No.2 Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV - V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Hafizh Assariy Madjid
N P M : 1905170097
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada BKAD Kota Medan)

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. H. Januri, SE., MM., M.Si., CMA
NIDN : 0109086502



Tembusan :
1. Peringgal



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Kode Pos-20112
Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228, Website : pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 82 /B.AP/BKAD/VII/2023

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i sebagai berikut :

Nama : HAFIZH ASSARIY MADJID
NIM : 1905170097
Universitas/Fakultas : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA / FAKULTAS EKONOMI
DAN BISNIS
Jurusan/Prog.Studi : AKUNTANSI / S-I

Telah selesai melaksanakan Riset di **Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan** pada **Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan** dari tanggal 30 Mei 2023 s.d tanggal 17 Juli 2023.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, Juli 2023

a.n. **Kepala BKAD Kota Medan**
Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan,



Muhammad Sayuti Harahap, S.E., M.M.
Penata Tk. I
NIP 198309252011011011

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**1. DATA PRIBADI**

Nama : Hafizh Assariy Madjid
Npm : 1905170097
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 04 Juni 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke : 1 dari 2 Bersaudara
Alamat : Marelan VII
No. Telepon : 08973724363
Email : hafizhmadjid12@gmail.com

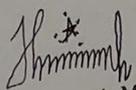
2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Suheri
Pekerjaan : Wirausaha
Nama Ibu : Vivi Purnama Sari
Pekerjaan : Wirausaha
Alamat : Marelan VII

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar : SD Negeri 066040 Medan
Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 38 Medan
Sekolah Menengah Kejuruan : SMK Negeri 9 Medan
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, September 2023


Hafizh Assariy Madjid